



**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA  
(RENJA )  
TAHUN 2022**

**BADAN KEUANGAN  
KABUPATEN NGAWI**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211  
Telp/Fax (0351) 749152, Email :  
badankeuangan@ngawikab.go.id



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
34. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 disusun berpedoman pada :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

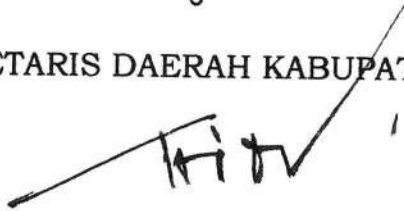
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI NGAWI,  
  
ONY ANWAR MARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 36



## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan nikmatNya sehingga Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan Tahun 2022. Tak lupa pula shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Renja Badan Keuangan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja Badan Keuangan Tahun 2022 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Tahun 2022 ini disadari masih terdapat kekurangan, namun seluruh jajaran aparatur Badan Keuangan Kabupaten Ngawi berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja guna terwujudnya pengelolaan Keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib.

Demikian semoga bermanfaat.

Ngawi, 2021

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN  
KABUPATEN NGAWI



**INDAH KUSUMAWARDHANI, SPT, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690612 199403 2 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR GAMBAR .....	3
DAFTAR TABEL .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Landasan Hukum.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu & Capaian Renstra PD.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	51
BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	53
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	53
3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD.....	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	56
BAB V PENUTUP.....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Renja Perangkat Daerah .....	7
Gambar 2 SOTK Badan Keuangan.....	8
Gambar 3 Sistematika Renja.....	10
Gambar 4 Keselarasan dengan Kebijakan Nasional.....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan dan Capaian Renstra PD .....	12
Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	33
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	38
Tabel 2.5 Usulan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022.....	52
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan PD.....	57

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 36 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PADA BADAN KEAUNGAN KABUPATEN  
NGAWI TAHUN 2022

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latarbelakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu berdasarkan Renstra yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja, adalah sebagai berikut:

- a. berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. rumusan program/kegiatan di dalam renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .

Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan sebuah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara Negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka

pendek yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun, dan berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan antar suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

RPJMN dan RPJMD merupakan 2 dokumen perencanaan yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat 3. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah serta keuangan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi disusun berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026. RKPD tahun 2022 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan RKPD tahun 2022 akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD seperti pada gambar berikut :



Gambar 1. Renja Perangkat Daerah

Berkaitan hal tersebut acuan dalam penyusunan rencana kerja Badan Keuangan Tahun 2022 adalah :

1. Evaluasi capaian kinerja pada Renja PD Tahun lalu (tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2021), dengan prioritas upaya penyelesaian terhadap target-target yang belum tercapai;
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan prediksi masa mendatang
3. Sasaran pokok pada RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005 – 2025, RPJMD Tahun 2021-2026 misi ke-3 yaitu Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima.
4. Rancangan awal RKPD kabupaten Tahun 2022.

Mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A, Badan Keuangan dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sebagai berikut:

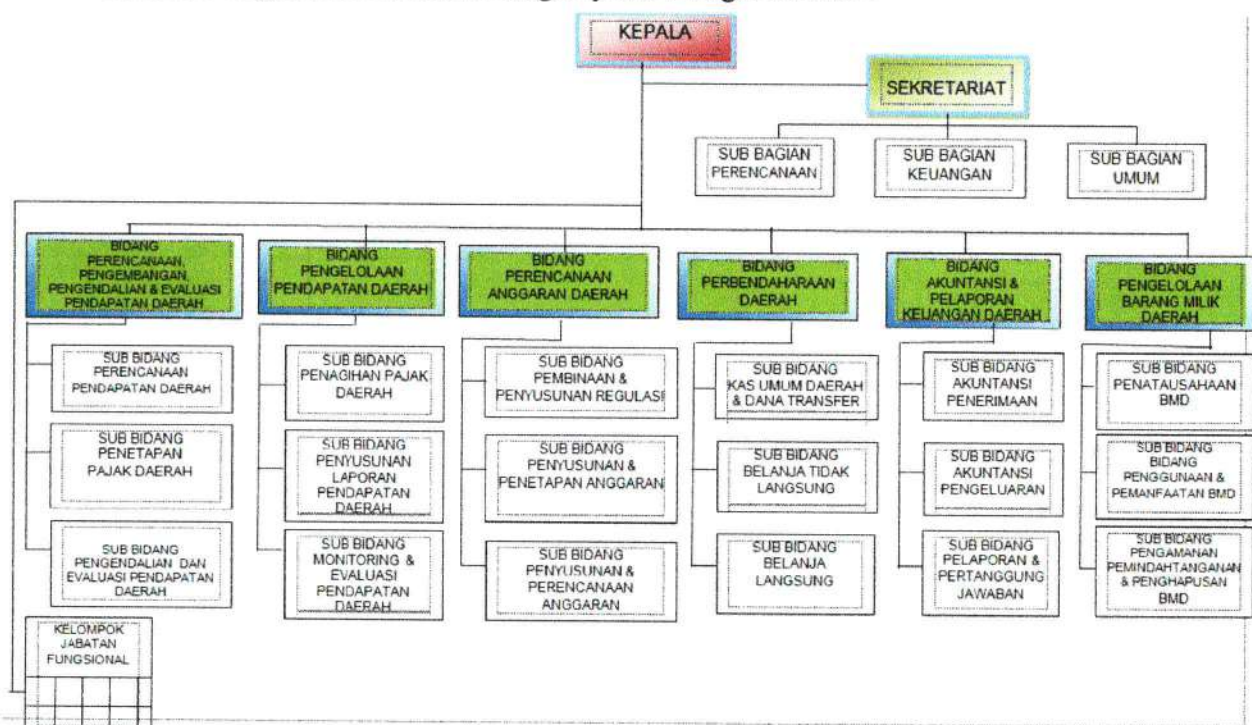
- a. penyusunan kebijakan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan keuangan dan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan Keuangan mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- c. penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- d. penyusunan rencana dan melaksanakan kebijakan penganggaran Pemerintah Daerah;
- e. penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang RAPBD dan PAPBD;
- f. penyusunan dan melaksanakan Kebijakan penatausahaan APBD;
- g. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
- h. penyusunan dan melaksanakan kebijakan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- i. penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. penyusunan Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. penyusunan Laporan semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya;
- l. melaksanakan Pemungutan pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengkoordinasikan dan fasilitasi pendapatan daerah;
- m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan APBD;
- n. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
- o. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- p. melakukan penagihan piutang daerah;
- q. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- r. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah daerah;
- s. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan tentang pengelolaan barang milik daerah;
- u. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Keuangan yaitu sebagai berikut :



Gambar 2. SOTK Badan Keuangan



## 1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Keuangan Tahun 2022 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan.

Tujuan disusunnya Renja Badan Keuangan Tahun 2022 adalah :

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2022;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Renja Badan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagaimana gambar dibawah ini :

- BAB I. PENDAHULUAN**
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU**
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
  - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD**
  - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran renja PD
- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**
- BAB V. PENUTUP**

Gambar 3. Sistematika Penulisan Renja

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target program kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan pada Renja sebelumnya, hasil dari evaluasi dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan selanjutnya, bila evaluasi yang dilakukan menunjukkan substansi yang dirumuskan pada Renja tidak sesuai maka dapat dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan yang diperlukan agar dihasilkan suatu perencanaan yang baik dan berkualitas tinggi dimana perencanaan tersebut akan tepat waktu, tepat jumlah (pendanaan) dan tepat sasaran dalam rangka menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Badan Keuangan menetapkan Rencana Kerja Tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Ngawi tahun 2022 yang meliputi :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 5 kegiatan yaitu :
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
  - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
  - a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Pencapaian realisasi program dan kegiatan Renja tahun 2020 yaitu 94,83 % dengan target pembiayaan dari APBD Tahun 2020 berjumlah : Rp. 13.170.897.532,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.489.738.432,00. Terdapat perubahan nomenklatur Program Kegiatan pada Tahun 2020 dan 2021 menyesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 dan perubahannya, hal ini berpengaruh terhadap perhitungan capaian realisasi target pada renstra karena indikator yang ditetapkan juga menyesuaikan nomenklatur program kegiatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Target pembiayaan dari APBD Tahun 2021 dari pagu Rp. 468.644.447.378,00 baru terealisasi Rp. 9.768.074.156,00 yaitu hanya 2 %.Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
Kabupaten Ngawi

No	Kode	Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2019)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	0 0 1	Program pelayanan administrasi perkantoran																	
	0 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim / terbitan	0	4.000 surat	0	4.500 surat	4.519 surat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket pengiriman yang dikirim	0	10 Paket	0	0 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon yang dibayar	0	36 Rekening	0	36 Rekening	36 Rekening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar	0	12 Rekening	0	12 Rekening	12 Rekening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang dibayar	0	12 Rekening	0	12 Rekening	12 Rekening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Internet yang dibayar	0	36 Rekening	0	36 Rekening	36 Rekening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Sewa Housing/ Domain	0	12 bulan	0	12 bulan	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya	0	55 Unit	0	47 Unit	47 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 005	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honor PPKD / SKPD yang dibayar	0	820 Kali	0	736 Kali	736 Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 005	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Lembar yang dibayarkan	0	480 Kali	0	19.680 Kali	19.680 Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 005	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai	0	lembar	0	1.766 lembar	2.600 lembar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 006	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase pemenuhan ATK	0	81 %	0	100 %	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 007	Penyediaan Barang Cetak dan Pergandaan	Jumlah Barang cetakan	0	20.000 Lembar	0	281.504 Lembar	281.504 Lembar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 007	Penyediaan Barang Cetak dan Pergandaan	Jumlah Barang yang digandakan	0	25.000 Lembar	0	18.444 Lembar	18.500 Lembar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 008	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	0	100 %	0	100 %	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 01 009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang disediakan	0	10 esemplar	0	48 esemplar	48 esemplar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-1 (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra							
				Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-1 (2019)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan									
				0	potong	0	128	potong	30.272.000	200	potong	63.885.000	200	potong	30.272.000		47,81%	0	potong	0	potong	60.544.000	
0	00	03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	0	Buah	0	128	Buah	0	100	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	00	03	004	Pengadaan Pakaian Khusus Har-hari Tertentu	0	potong	0	128	potong	30.272.000	100	potong	30.272.000	48,17%	0	0	0	0	0	0	60.544.000		
				Jumlah Pakaian olah raga yang dibeli / diadakan	0	stel	0	0	stel	0	100	stel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Jumlah sepatu yang dibeli atau diadakan	0	Pasang	0	0	Pasang	0	0	Pasang	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	0	0	5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0		0	45		61.216.000	45		61.216.000	100,00%	0	0	0	0	0	0	61.216.000		
0	00	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	orang	0	45	orang	293.241.535	43	orang	61.216.000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	354.457.835	
				Jumlah Peserta diklat formal	0	Kali	0	4	Kali	0	2	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	6	Program peningkatan capaian kinerja dan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan satuan kerja pengelola keuangan daerah	0		0	0		69.372.800	30		66.561.000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	136.933.800	
0	00	06	001	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja OPD/SKPD	0	dokumen	0	10	dokumen	62.637.800	12	dokumen	60.923.000	99,96%	0	0	0	0	0	0	0	0	123.498.800
				Jumlah dokumen perencanaan penganggaran OPD yang disusun tepat waktu	0	laporan	0	11	laporan	0	6	laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah laporan kinerja OPD yang disusun tepat waktu	0	laporan	0	15	laporan	6.735.000	12	laporan	5.638.000	99,18%	0	0	0	0	0	0	0	0	12.327.000
4	0	0	8	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	0		0	0		117.060.000	233		113.717.300	97,14%	0	0	0	0	0	0	0	230.777.300	
0	00	08	001	Monitoring dan Evaluasi DAK Infrastruktur Berbasis Web	0	Kali	0	4	Kali	85.600.000	20	Kali	117.060.000	70,27%	0	0	0	0	0	0	0	0	167.863.300
				Jumlah Monitoring yang dilaksanakan	0	Desa	0	213	Desa	31.460.000	213	Desa	117.060.000	26,87%	0	0	0	0	0	0	0	0	62.914.000

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan				
				0 Kali	0 Kali	0 Kali	2 Kali	0 Kali	0 Kali	Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)		0 Kali	0 Kali	0 Kali	12 Kali	0		
										0	0							
13	4 2 19	Program penatausahaan keuangan pemerintah daerah	Jumlah sosialisasi yang diadakan	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	663.823.600		
4	02 19 000 1	Fasilitas Pelaksanaan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi gaji yang ditindaklanjuti	0	395	108.574.279	12	Laporan	108.539.950	12	Laporan	0	0	0	2370	Laporan	213.114.229	
			Jumlah Rekonsiliasi Iuran Wajib Pegawai (IWP) yang ditindaklanjuti	0	11	Rekonsiliasi	0	16	Rekonsiliasi	0	16	Rekonsiliasi	0	0	0	66	Rekonsiliasi	0
			Jumlah Rekonsiliasi Jaminan Kecelakaan (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang ditindaklanjuti PNS	0	11	Rekonsiliasi	0	6	Rekonsiliasi	0	6	Rekonsiliasi	0	0	0	66	Rekonsiliasi	0
			Jumlah Rekonsiliasi BPJS yang ditindaklanjuti	0	11	Rekonsiliasi	0	16	Rekonsiliasi	0	16	Rekonsiliasi	0	0	0	66	Rekonsiliasi	0
			Jumlah Dokumen Laporan Gaji dan Tunjangan yang disampaikan ke DJPK	0	8	Dokumen	0	12	Dokumen	0	12	Dokumen	0	0	0	48	Dokumen	0
			Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan	0	395	Surat	0	12	Surat	0	12	Surat	0	0	0	2330	Surat	0
			Jumlah Surat Keterangan Pembentukan Pembayaran (SKFP) yang diterbitkan	0	395	Surat	0	450	Surat	0	450	Surat	0	0	0	1560	Surat	0
			Jumlah Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) yang diterbitkan	0	1750	Surat	0	2.000	Surat	0	2.000	Surat	0	0	0	10600	Surat	0
4	02 19 000 2	Fasilitas Pelaksanaan Penatausahaan Belanja Langsung	Jumlah OPD yang menindaklanjuti hasil pembinaan Penatausahaan 47 OPD x 12 Bin	0	564	Kali	376	Kali	367.755.003	376	Kali	0	0	0	0	3384	Kali	737.708.886
			Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan	0	421	Surat	0	611	Surat	0	611	Surat	0	0	0	2526	Surat	0
			Jumlah Pemberian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	0	10125	Surat	0	11.000	Surat	0	11.000	Surat	0	0	0	60750	Surat	0

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan (Output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi/ Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	94,48%	0 Laporan		1188 Laporan	225.494,273			
4	02.19.000.3	Facilitasi Pelaksanaan Penatuesanaan Kas Umum Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas harian yang tepat waktu	0 Laporan	198 Laporan	124.612,573	264 Laporan	106.876,000	264 Laporan	100.981,700	94,48%	0 Laporan	1188 Laporan	225.494,273	
			Jumlah Laporan Posisi Kas mingguan yang tepat waktu	0 Laporan	47 Laporan	0	48 Laporan	0	48 Laporan	0	0	0 Laporan	268 Laporan	0	
			Jumlah Laporan Posisi Kas SIKO Ke DJPK yang tepat waktu	0 Laporan	8 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	0	0 Laporan	48 Laporan	0	
			Jumlah Penyempaian Laporan DAK (leak, non Fisk) yang tepat waktu	0 Laporan	47 Laporan	0	52 Laporan	0	52 Laporan	0	0	0 Laporan	222 Laporan	0	
			Jumlah Penyempaian Laporan Daftar Rekap Tansaksi Harian yang tepat waktu	0 Laporan	8 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	0	0 Laporan	48 Laporan	0	
			Jumlah Penyempaian Laporan Lembar Komisasi Transfer yang tepat waktu	0 Laporan	8 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	0	0 Laporan	48 Laporan	0	
			Jumlah Penyempaian Persyaratan Pencairan BK Prop yang tepat waktu	0 Surat	1 Surat	0	1 Surat	0	1 Surat	0	0	0 Surat	6 Surat	0	



No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan (Output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan sid Tahun Berjalan (tahun 2021) TW I	Realisasi Target Renstra	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)					
14	4 2 20	Program pengelolaan barang milik daerah		0	0									
	4 02 20 004	Faciliasi Perusahaahan Pengelolan BMD	Jumlah rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan	0 Kali	4 Kali	0	0	5 Kali	265.909.500	5 Kali	263.594.900	0	24 Kali	263.594.900
			Jumlah laporan hasil penilaian BMD yang dicatat	0 laporan	12 laporan	0	0	2 laporan	0	2 laporan	0	0	72 laporan	0
			Jumlah Pembinaan BMD yang dicatat	0 kali	kali	0	0	1 kali	0	1 kali	0	0	kali	0
			Jumlah Laporan BMD	0 laporan	laporan	0	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	laporan	0
	4 02 20 006	Pengamanan Pemondokan dan Penghapusan BMD	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengamanan BMD yang dilaksanakan	0 SK	47 SK	0	1.016.346.000	2 SK	1.128.085.000	2 SK	976.472.000	0	282 SK	1.992.821.000
			Jumlah Dokumen asil kepemilikan BMD yang didingkan	0 Berkas/ Dokumen	2 Berkas/ Dokumen	0	0	2 Berkas/ Dokumen	0	2 Berkas/ Dokumen	0	0	12 Berkas/ Dokumen	0
			Jumlah Dokumen Usulan pemondokan yang dilaksanakan	0 SK	47 SK	0	0	3 SK	0	3 SK	0	0	282 SK	0
			Jumlah Dokumen Usulan penghapusan yang dilaksanakan	0 Dokumen	47 Dokumen	0	0	20 Dokumen	0	20 Dokumen	0	0	282 Dokumen	0
	4 02 20 005	Pengurusan dan Pemertasaan BMD	Jumlah OPD yang menympaikan RKBMD tepat waktu OFD X 2	0 laporan	laporan	0	546.354.000	47 laporan	596.807.880	47 laporan	92,78%	0	282 laporan	606.807.880
			Jumlah OPD yang menympaikan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan/Perawatan tepat waktu 47 OPD X 2	0 laporan	laporan	0	0	47 laporan	0	47 laporan	0	0	282 laporan	0
			Jumlah Laporan SK Peningkatan Status Penggunaan yang disusun	0 dokumen	47 dokumen	0	0	47 dokumen	0	47 dokumen	0	0	282 dokumen	0
			Jumlah Dokumen pengajuan usulan pemertasaan BMD	0 dokumen	20 dokumen	0	0	20 dokumen	0	20 dokumen	0	0	282 dokumen	0
6	4 2 15	Program Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		0	0	0	1.894.850.000		1.833.789.290	96,78%	0	0	1.833.789.290	

No	Kode	Ususan/Bidang/Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) TW I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra														
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	100,00%	0																	
4	02	15	001	Perencanaan Pajak Daerah	Jumlah Data Pendataan Daerah yang Akurat	0	Kali	0	5470	Kali	468.417.000	12	Kali	210.167.000	5470	Kali	194.646.450	92,62%	0	Kali	0	31.244	Kali	683.083.450		
4	02	15	002	Fasilitas Pendataan Pajak Daerah	Jumlah Wajib pajak daerah yang ditetapkan	0	WP	0	1500	WP	452.127.800	600	WP	1.480.285.000	900	WP	1.413.563.300	96,80%	0	WP	0	8.400	WP	1.895.891.100		
					Jumlah Objek Pajak yang ditetapkan	0	OP	0	213	OP	0	800	OP	960	OP	0	0	OP	0	0	OP	0	626	OP	0	
					Jumlah DKKP yang diterbitkan	0	lembar	0	19	lembar	0	43.400	lembar	42000	lembar	0	0	lembar	0	0	lembar	0	62	lembar	0	
					Jumlah Cek SPP yang diterbitkan	0	lembar	0	3	lembar	0	653.000	lembar	653000	lembar	0	0	lembar	0	0	lembar	0	12	lembar	0	
4	02	15	003	Pengendalian dan Evaluasi Pendataan Daerah	Jumlah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendataan daerah	0	Kali	0	278	Kali	84.432.000	12	Kali	233.918.000	12	Kali	233.918.000	100,00%	0	Kali	0	1.562	Kali	318.360.000		
8	4	2	22	Program Pengelolaan Pajak Daerah		0		0			1.152.042.000			1.152.042.000		100,00%	0			0			1.152.042.000			
4	02	22	000	1 Penyalangan Pajak Daerah	Jumlah laporan SPT yang diagih	0	Laporan	0	Laporan	0	285.570.500	12	Laporan	285.570.500	12	Laporan	285.570.500	100,00%	0	Laporan	0	1278	Laporan	285.570.500		
					Jumlah laporan SKPD yang diagih	0	Laporan	0	Laporan	0	47	Laporan	47	Laporan	47	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0		
					Jumlah Laporan atas Surat Teguran dan Himbauan yang diterbitkan	0	Laporan	0	Laporan	0	47	Laporan	47	Laporan	47	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0		
					Jumlah Surat Keberatan, Pengurangan dan Banding yang diterbitkan	0	surat	0	surat	0	35	surat	35	surat	35	surat	0	0	surat	0	0	surat	0	0		
4	02	22	000	2 Fasilitas Penyusunan Laporan Pendataan	Jumlah Laporan realisasi Pendataan Kali Daerah yang disusun akurat dan tepat waktu	0	laporan	0	213	laporan	437.570.435	12	laporan	156.496.000	12	laporan	156.496.000	100,00%	0	laporan	0	1278	laporan	593.086.435		
					Jumlah Laporan realisasi Pendataan Dana Perimbangan yang disusun akurat dan tepat waktu	0	laporan	0	213	laporan	0	12	laporan	12	laporan	0	0	0	laporan	0	0	laporan	0	1278	laporan	0
					Jumlah Laporan realisasi Pendataan lain-lain yang disusun akurat dan tepat waktu	0	laporan	0	2	laporan	0	12	laporan	12	laporan	0	0	0	laporan	0	0	laporan	0	8	laporan	0
4	02	22	000	3 Monitoring dan Evaluasi Pendataan Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring yang dilaksanakan	0	Laporan	0	7.128	Laporan	876.811.000	12	Laporan	710.975.500	12	Laporan	710.975.500	100,00%	0	Laporan	0	4206	Laporan	1.987.796.500		
					Jumlah laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan	0	Laporan	0	323	Laporan	0	12	Laporan	0	12	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	2086	Laporan	0





No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan		
				0 Kali	0 Dokumen	0 Kali	3 Dokumen	105 Kali	3 Dokumen	Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)		0 Kali	0 Dokumen	0 Kali	0 Dokumen
										Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sid Tahun Berjalan (tahun 2021) TW I				
			Jumlah pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP	0 Kali	0 Dokumen	0 Kali	3 Dokumen	105 Kali	3 Dokumen	0 Kali	0 Dokumen	0 Kali	0 Dokumen	0	
			Jumlah Regulasi tentang Akuntansi Pengeluaran yang dihasilkan	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	
	24 003	Kegiatan Pembinaan entitas Pelaporan	Regulasi tentang manajemen akuntansi dan pelaporan Keuangan daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	413.730.000	100,00%	0 Dokumen	0 Dokumen	413.730.000	
			Jumlah laporan hasil koordinasi tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	0 Laporan	0 Laporan	47 Laporan	47 Laporan	47 Laporan	47 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	
	24 004	Kegiatan Penyusunan Rancangan dan rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan & Rencanub tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan ke BPK sesuai SAP & tepat waktu	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	997.928.000		0 Dokumen	0 Dokumen	0	
			Jumlah Pelaksanaan BinteK tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0 Kali	0 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0	
			Jumlah Konsolidasi Laporan BLUD kedalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0 Laporan	0 Laporan	165 Laporan	165 Laporan	165 Laporan	165 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	
			Jumlah Konsolidasi Realisasi APBD	0 Laporan	0 Laporan	165 Laporan	165 Laporan	165 Laporan	165 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	
			Jumlah Laporan Keuangan Konsolidasi atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	0 Laporan	0 Laporan	165 Laporan	165 Laporan	165 Laporan	165 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	
			Jumlah Iktisar Kinerja Keuangan Daerah yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	
			Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas memorial transaksi non kas	0 Kali	0 Kali	47 Kali	47 Kali	47 Kali	47 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0	
			Jumlah Pembinaan, Sosialisasi tentang Penyusunan keuangan Daerah sesuai SAP	0 Kali	0 Kali	47 Kali	47 Kali	47 Kali	47 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0	

No	Kode	Uraian/Bidang/Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) TW I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.2.1	5.2.5.2.1.1	BADAN KEUANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam setahun	468.644.447.378 47.681.911.285				305.413.941.851 10.409.720.399	9.768.074.156 7.528.656.381	2% 16%
5.2.5.2.1.1.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	94.160.000				17.987.500	-	0%
5.2.5.2.1.1.2.01.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran OPD yang disusun	4 Dokumen 14.160.000				1 Dokumen	2 Dokumen	0%
5.2.5.2.1.1.2.01.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang disusun Jumlah Laporan Kinerja OPD yang disusun	22 Dokumen 7 Dokumen 80.000.000				4 Dokumen 1 Dokumen	5 Dokumen 4 Dokumen	- 0%
5.2.5.2.1.1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Prosentase Dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	44.765.173.285				0 kali 10.082.153.299	0 kali	0%
5.2.5.2.1.1.2.02.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	44.756.416.285				255 Orang 10.078.774.799	240 Orang 7.528.656.381	17%
5.2.5.2.1.1.2.02.7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disusun	28 Dokumen 48 Laporan 6.757.000				6 Dokumen 12 Laporan 3.376.500	5 Dokumen 12 Laporan	- 0%
5.2.5.2.1.1.2.05		Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun Prosentase ASN yang disiplin dalam setahun	237.064.000				0 Laporan 257.064.000	0 Laporan	0%
5.2.5.2.1.1.2.05.2		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakan Dinas yang dibeli / diadakan	95.200.000				255 Meter	0 Meter	0%
			Jumlah Pakan Baik yang dibeli / diadakan Jumlah Pakan Olah Raga yang dibeli / diadakan	170 Potong 85 Stel				170 Potong 0 Stel	0 Potong 0 Stel	- -

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)			
5.2.5.2.1.1.2.05.9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	40 Orang	341.864.000		0 Orang	0 Orang	0%	
5.2.5.2.1.1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Diklat / Pelatihan yang diadakan	1 Kali	502.835.000		0 Kali	0 Kali	0%	
5.2.5.2.1.1.2.06.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	100 %	12.000.000		25 %	0 %	0%	
5.2.5.2.1.1.2.06.2		Penyediaan Perakitan dan Perengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ATK	100 %	202.984.000		0 %	10 %	0%	
5.2.5.2.1.1.2.06.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	2300 Kotak	81.450.000		1000 Kotak	700 Kotak	0%	
5.2.5.2.1.1.2.06.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak	48383 Lembar	62.091.000		0 Lembar	2000 Lembar	0%	
5.2.5.2.1.1.2.06.6		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bawang yang Digandakan Jumlah Buku Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	25000 Lembar 12 Buah	34.933.000		6000 Lembar 0 Buah	1000 Lembar 0 Buah	0%	
5.2.5.2.1.1.2.06.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Iklan yang digandakan Jumlah Surat Kabar yang digandakan Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar yang dihadiri/ diikuti	1 Paket 36 Eksemplar 40 Kali	211.317.000		0 Paket 9 Eksemplar 15 Kali	0 Paket 3 Eksemplar 13 Kali	0%	
5.2.5.2.1.1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang Disiplin dalam setahun	0 Unit	821.897.000		0 Unit	0 Unit	0%	
5.2.5.2.1.1.2.07.2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	0 Unit	627.522.000		0 Unit	0 Unit	0%	

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan	
				5 Unit	9.387.000		Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	5 Unit	162.838.700	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	5.2.5.2.1.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair yang dibeli / diadakan	5 Unit	9.387.000				0 Unit		0%	
	5.2.5.2.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	1 Unit	172.346.000				0 Unit		0%	
	5.2.5.2.1.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dibeli / diadakan	24 Unit					0 Unit			
	5.2.5.2.1.1.2.08	Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	12.682.000				1 Unit		0%	
	5.2.5.2.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam setahun		1.695.982.000					162.838.700	0%	
	5.2.5.2.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di kirim	400 Surat	2.500.000				0 Surat	125 Surat	0%	
	5.2.5.2.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Sewa Hosting / vpn yang dibayar	1 Paket	374.738.000				0 Paket	0 Paket	0%	
			Jumlah Rekening Air yang dibayar	12 Rekening					3 Rekening	3 Rekening		
			Jumlah Rekening Listrik yang dibayar	12 Rekening					3 Rekening	3 Rekening		
			Jumlah Rekening telepon / internet yang dibayar	12 Rekening					3 Rekening	3 Rekening		
			Jumlah Rekening Telepon yang dibayar	12 Rekening					3 Rekening	3 Rekening		
	5.2.5.2.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah alat dan Bahan Kebersihan yang dibeli	103 Buah	22.932.000				0 Buah	4.860.000	0%	
			Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan	12 Orang / Bulan					3 Orang / Bulan	3 Orang / Bulan		
	5.2.5.2.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Benda Pos yang diadakan	816 Buah	693.812.000				400 Buah	113.038.000	0%	
			Jumlah Lumber yang dibayarkan ( Jumlah Orang x Jam)	21.168 Orang /Jam					4428 Orang /Jam	0 Orang /Jam		
			Jumlah Pembayaran Honor ( Jumlah Orang x Bulan)	150 Orang / Bulan					0 Orang / Bulan	0 Orang / Bulan		



No	Kode	Urusan/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output))	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)		Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021) TW I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
5.2.5.2.1.1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dalam setahun	168.760.000				27.152.500		0%
5.2.5.2.1.1.2.09.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayar pajaknya	40.610.000				0 Unit	1 Unit	0%
5.2.5.2.1.1.2.09.2		Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lajangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan	52.500.000				0 Unit / Tahun	1 Unit / Tahun	0%
5.2.5.2.1.1.2.09.6		Pemeliharaan Peralihan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dibayar pajaknya	29.400.000				13 Unit	11 Unit	0%
5.2.5.2.1.1.2.09.9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Mobil Dinas / Operasional (Jml Unit Kendaraan x Jml Pengeliharaan)					0 Unit / Tahun	0 Unit / Tahun	0%
5.2.5.2.1.1.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perawatan Kerja yang dipelihara (Jml Unit x Jml Pemeliharaan)					11 Kali	0 Kali	0%
5.2.5.2.1.2.01		PROGRAM PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Perbaikan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan	12.682.000				0 Paket	0 Paket	0%
5.2.5.2.1.2.01.1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Pendengkapan Gedung/kantor yang dipelihara (Jml Unit x Jml Pemeliharaan)	416.709.012.093				0 Unit	0 Unit	0%
5.2.5.2.1.2.01.1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen APBD yang disusun sesuai Regulasi dan tepat waktu	1.330.881.000				294.186.478.852	2.289.417.775	1%
5.2.5.2.1.2.01.1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPA5	Persentase Regulasi Daerah yang disusun tepat waktu	154.442.000				179.242.000		0%
			Jumlah Dokumen KUA yang disusun					0 Dokumen	0 Dokumen	0%
			Jumlah Dokumen PPA5 yang disusun					0 Dokumen	0 Dokumen	0%

No	Kode	Usran/Bidang/Usran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)		1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
	5.2.5.2.1.2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA yang disusun	1 Dokumen	140.966.000				1 Dokumen	59.990.000	0 Dokumen	0%	
	5.2.5.2.1.2.2.01.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan PPAS yang disusun	1 Dokumen					0 Dokumen		0 Dokumen		
	5.2.5.2.1.2.2.01.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang diverifikasi	94 Dokumen	28.825.000				0 Dokumen		0 Dokumen	0%	
	5.2.5.2.1.2.2.01.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD yang diverifikasi	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang diverifikasi	94 Dokumen	24.525.000				0 Dokumen		94 Dokumen	0%	
	5.2.5.2.1.2.2.01.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD yang diverifikasi	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang diverifikasi	47 Dokumen	28.825.000				0 Dokumen		47 Dokumen	0%	
	5.2.5.2.1.2.2.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang diverifikasi	1 Dokumen	516.988.800				0 Dokumen		0 Dokumen	0%	
	5.2.5.2.1.2.2.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD yang disusun dalam 1 tahun	1 Dokumen	364.444.000				1 Dokumen		0 Dokumen	0%	
	5.2.5.2.1.2.2.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD yang disusun dalam 1 tahun	0 Kall	248.241.000				0 Kall		0 Kall	0%	
			Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan APBD	0 Dokumen					0 Dokumen		0 Dokumen		
			Jumlah Peraturan yang disusun	0 Dokumen					0 Dokumen		0 Dokumen		

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)			
5.2.5.2.1.2.2.02	5.2.5.2.1.2.2.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase Laporan / Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	565.825.400				156.885.400		0%
	5.2.5.2.1.2.2.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas Harian	109.114.000				18.072.000	0 Laporan	0%
	5.2.5.2.1.2.2.02.2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	5.580.000				1.395.000	1 Laporan	0%
	5.2.5.2.1.2.2.02.3	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D yang diterbitkan	310.712.000				96.060.000	427 Surat	0%
			Jumlah SPD yang diterbitkan						65 Surat	
			Jumlah SPN yang diteliti						427 Surat	
	5.2.5.2.1.2.2.02.5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan dan Koordinasi Dana Transfer	13.795.200				3.600.300	1 Laporan	0%
			Jumlah LKT ( Laporan Konfirmasi Transfer )						1 Laporan	
	5.2.5.2.1.2.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	Jumlah Laporan Kas Mingguan	105.789.000				33.043.700	3 Kali	0%
			Jumlah Pembinaan SKPD						12 Laporan	
			Jumlah Rekonsiliasi Gaji						2 Kali	
			Jumlah SPP yang diterbitkan						6 Kali	
			Jumlah Rekonsiliasi EKU						111 Surat	
	5.2.5.2.1.2.2.02.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.	Jumlah Rekonsiliasi DTH /RTH	20.835.200				4.694.600	0 Kali	0%
			Jumlah Rekonsiliasi Posisi Kas dengan Bank Jatem						148 Surat	
			Jumlah Rekonsiliasi SP Fungsional						0 Kali	
			Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Rekonsiliasi dan Verifikasi	692.987.000				86.027.600	0 Laporan	0%
	5.2.5.2.1.2.2.08	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Rekonsiliasi SP						6 Kali	
			Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Rekonsiliasi dan Verifikasi						0 Kali	
			Jumlah Rekonsiliasi SP						1 Laporan	

No	Kode	Usuan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan (Output))	Target Kinerja Capaian Program (Rencana PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)		Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan	
				12 Kali	71.328.000		Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	3 kali	2.026.000	3 kali	0%
5.2.5.2.1.2.03.1		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas Daerah	12 kali	71.328.000			3 kali	2.026.000	3 kali	0%	
			Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah	13 kali				3 kali		3 kali	0%	
			Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memotivasi yang dilakukan	12 kali				3 kali		3 kali	0%	
5.2.5.2.1.2.03.2		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembelian, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembelian A.A.A.	2 kali	85.190.000			0 kali	-	47 kali	0%	
5.2.5.2.1.2.03.3		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dilaksanakan	4 kali	78.229.000			0 kali	4.606.000	0 kali	0%	
5.2.5.2.1.2.03.4		Konsolidasi Laporan Keuangan APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan APBD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	47 Laporan	91.198.000			12 Laporan	38.080.000	2 Laporan	0%	
5.2.5.2.1.2.03.5		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 kali	147.744.000			0 kali	35.115.500	2 kali	0%	
5.2.5.2.1.2.03.8		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	2 Dokumen	74.632.000			0 Dokumen	-	2 Dokumen	0%	
5.2.5.2.1.2.03.9		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah yang disusun	0 Dokumen	80.962.000			0 Dokumen	-	0 Dokumen	0%	
			Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	2 kali				0 kali		0 kali	0%	
5.2.5.2.1.2.03.11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan	1 kali	63.566.000			0 kali	-	0 kali	0%	
5.2.5.2.1.2.04		Penunjang Urusan Kewangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan / Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu		414.093.317.893				288.764.343.952		0%	

No	Kode	Uraian/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	2019	2020	2021	2022	
5.2.5.2.1.2.2.04.8		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan ADD ( 213 x 4 tahap )	852 Desa	389.862.891.000			213 Desa	290.057.028.400	213 Desa	138.832.300	0%
			Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan DD ( 213 desa x 2 tahap )	426 Desa				0 Desa		0 Desa		
			Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan SAIRPRAS Pedesaan	213 Desa				0 Desa		0 Desa		
			Jumlah RT yang mendapatkan Bantuan Keuangan INSENTIF RT	5604 RT				0 RT		0 RT		
			Jumlah RW yang mendapatkan Bantuan Keuangan INSENTIF RW	1212 RW				0 RW		0 RW		
			Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan BINA MUTIARA	5 Desa				0 Desa		0 Desa		
5.2.5.2.1.2.2.04.9		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah SP2D RT yang diterbitkan	60 Dokumen	11.411.630.000			6 Dokumen	3.707.315.552	0 Dokumen		0%
5.2.5.2.1.2.2.04.10		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	213 Desa	12.833.996.893			0 Desa	-	0 Desa	2.100.666.475	16%
5.2.5.2.1.2.2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah SP2D Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota yang diterbitkan	426 Dokumen	15.000.000			105 Dokumen	-	0 Dokumen		0%
5.2.5.2.1.2.2.05.1		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan yang dilaksanakan	2 Kali	15.000.000			0 Kali	-	0 Kali		0%
5.2.5.2.1.3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	2 Kali				0 Kali		0 Kali		
5.2.5.2.1.3.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib		1.125.686.000				234.390.000			0%
5.2.5.2.1.3.2.01.3		Persentase Laporan / Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat Waktu			1.125.686.000				234.390.000			0%
5.2.5.2.1.3.2.01.3		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD yang dilaksanakan	1 Kali	162.770.000			1 Kali	73.101.000	0 Kali		0%

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keuaman Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan	
				1 Dokumen	219.816.500		Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	1 Dokumen	7.000.000	0 Dokumen	0 Dokumen
			Jumlah Dokumen Pengajuan Usulan Pemanfaatan BMD	47 Laporan				1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
			Jumlah SOPD yang menyampaikan RKBMD	47 Laporan				10 Laporan	38 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	
			Jumlah SK Penetapan Status Penggunaan yang disusun	5 Laporan	219.816.500			0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	
5.2.5.2.1.3.2.01.5		Penaulaan Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi jenis BMD yang dicatat	5 Laporan	219.816.500			1 Laporan	7.000.000	2 Laporan	2 Laporan	0%
5.2.5.2.1.3.2.01.7		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Asli Kepemilikan BMD yang disimpan	2 Dokumen	305.005.000			0 Dokumen	49.520.000	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
			Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengamanan BMD yang dilaksanakan	2 Laporan				1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	
5.2.5.2.1.3.2.01.10		Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen usulan Pemeliharaan yang dilaksanakan	2 Dokumen	343.917.500			2 Dokumen	35.596.000	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
			Jumlah Dokumen Usulan Penghapusan yang dilaksanakan	15 Dokumen				0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	
5.2.5.2.1.3.2.01.11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi yang dilaksanakan	2 kali	69.120.000			1 kali	69.174.000	1 kali	1 kali	0%
5.2.5.2.1.4		PROGRAM PENGECUCUAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penghapusan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kategori Baik		3.133.538.000				865.352.000			0%
5.2.5.2.1.4.2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Penyusunan Perda / Perbup tentang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah		3.133.538.000				865.352.000			0%
5.2.5.2.1.4.2.01.1		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Kegiatan Perencanaan Pendapatan	1 Dokumen	320.500.000			1 Dokumen	170.784.000	1 Dokumen	1 Dokumen	0%
			Jumlah Pendampingan Jumlah Survey Potensi Pajak Daerah	2 kali 1.000 Wajib Pajak				0 kali 225 Wajib Pajak		0 kali 250 Wajib Pajak	0 kali 250 Wajib Pajak	
5.2.5.2.1.4.2.01.2		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Bimtek yang diselenggarakan	1 kali	198.920.000			0 kali	49.528.000	0 kali	0 kali	0%

No	Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2019)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2019)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2020)		
				2 kali					0 Kali		0 Kali	
	5.2.5.2.1.4.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Koordinasi tentang Pengembangan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3 Dokumen	125.480.000				0 Dokumen	6.680.000	0 Dokumen	0%
	5.2.5.2.1.4.2.01.6	Pengolahan, Penellihan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Monitoring Pendapatan Daerah dan PBB	19 kali	23.320.000				4 Kali	7.460.000	3 Kali	0%
	5.2.5.2.1.4.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Pemeriksaan Obyek Pajak Daerah Jumlah Aplikasi Pajak Daerah yang dipelihara	11 kali 1 Aplikasi	1.400.936.000				3 Kali 0 Aplikasi	260.494.000	3 Kali 0 Aplikasi	0%
			Jumlah Duit RP, SPPT, dan SPKD yang dicetak	10 Box					7 Box		7 Box	
			Jumlah Obyek Pajak yang ditagih	615750 OP					340400 OP		450000 OP	
			Jumlah Pajak yang ditagih	6600 Wajib Pajak					5300 Wajib Pajak		5150 Wajib Pajak	
			Jumlah Pendampingan Jumlah SPPT dan SPKD yang dicetak	2 kali 655000 Lembar					0 Kali 218250 Lembar		0 Kali 655000 Lembar	
			Jumlah Himbauan Pajak ( Brosur Pamflet, dll )	1000 Lembar					0 Lembar		0 Lembar	
	5.2.5.2.1.4.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Konsultasi Pajak Daerah	4 kali	15.694.000				1 Kali	6.000.000	0 Kali	0%
			Jumlah Pendampingan Pajak Daerah	4 kali					1 kali		0 kali	
	5.2.5.2.1.4.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pendataan Daerah yang disampaikan tepat Waktu	12 Laporan	112.171.500				3 Laporan	8.768.000	3 Laporan	0%
	5.2.5.2.1.4.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Intensifikasi / Penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan	195 kali	283.092.000				38 kali	20.500.000	58 kali	0%
	5.2.5.2.1.4.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	24 Laporan	652.724.500				6 Laporan	52.838.000	6 Laporan	0%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah di analisis berdasarkan jenis indikator yang ditetapkan pada masing-masing program kegiatan sesuai tugas pokok fungsi. Mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A, Badan Keuangan dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan keuangan dan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengevaluasi Kinerja ditetapkan Sasaran Rencana Strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan yaitu ‘Tercapainya Opini BPK WTP’ yang diukur dengan :

1. Persentase tingkat kualitas pengelolaan keuangan kategori baik;  
IKU tersebut didukung oleh 4 indikator program yaitu
  - a. Persentase PAD terhadap APBD, Kategori Tertib
  - b. Persentase Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu, Kategori Tertib
  - c. Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD Prosentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD, Kategori Tertib
  - d. Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan Sesuai SAP, Kategori Tertib
2. Persentase tingkat pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tertib dalam penatausahaan, pemanfaatan dan pengawasan kategori baik;  
IKU tersebut didukung oleh 1 indikator program yaitu
  - a. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib

Kinerja Badan Keuangan secara keseluruhan telah memenuhi target yang direncanakan sebagaimana dilihat di tabel 2.2.



Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kabupaten Ngawi**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 ( thn n-2)	Tahun 2021 ( thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)			
1	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	3	4	97,90%	97,90%	97,90%	98,00%	97,90%	97,90%	97,90%	97,90%	98,00%	98,00%	13
			Persentase Belanja Pendidikan	-	-	20%	20%	-	-	-	20%	20%	20%	
			Persentase Belanja Kesehatan	-	-	10%	10%	-	-	-	10%	10%	10%	
			Persentase SILPA ( sudah termasuk jumlah laporan silpa)	-	-	6,70%	6,70%	-	-	-	6,70%	6,70%	6,70%	
			Persentase SILPA terhadap APBD	-	-	15%	15%	-	-	-	15%	15%	15%	
			Persentase Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah APBD	-	-	25%	25%	-	-	-	25%	25%	25%	
			Penetapan APBD	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	
			Opini BPK terhadap laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase Program Kegiatan yang tidak terlaksana	-	-	10%	10%	-	-	10%	10%	
			Persentase Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	-	-	1%	1%	-	-	1%	1%	
			Rasio anggaran sisa thd total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	-	-	0,10%	0,10%	-	-	0,10%	0,10%	
			persentase belanja urusan pemerintahan umum ( dikurangi transfer Expenditures )	-	-	1,00%	1,00%	-	-	1,00%	1,00%	
			Persentase Jumlah Bagi Hasil Kab/Kota dan Desa yang dikelola	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
			Persentase Deviasi realisasi PAD thd anggaran PAD dalam APBD yang disusun tepat waktu	-	-	0,86%	0,86%	-	-	0,86%	0,86%	
			Transparansi dan Partisipasi Publik	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
			Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib	-	-	95,01%	95,03%	95,05%	95,10%	95,01%	17,08%	95,05%	95,10%	
		-	Manajemen Aset	95,01%	95,03%	95,05%	95,10%	95,01%	17,08%	95,05%	95,10%	
		-	Transparansi dan Partisipasi Publik	-	-	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	
		-	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	-	-	100%	100%	80%	99%	100%	100%	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan, untuk itu Badan Keuangan harus mampu mengukur kinerja yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta mengetahui tantangan atau peluang yang dimiliki dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi atau catatan strategis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan akan dilaksanakan. Identifikasi permasalahan dan hambatan urusan pengelolaan keuangan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD kategori baik;
2. Masih kurangnya pemahaman SKPD tentang pengelolaan keuangan.
3. Kurangnya pemahaman SKPD dalam memahami peraturan perundang-undangan yang baru tentang penyusunan anggaran daerah;
4. Aplikasi (Misalnya SP2D dengan Bank, SISMIOP di kecamatan) belum terlaksana secara online;
5. Penyampaian laporan BMD yang tidak tepat waktu.

Permasalahan dan hambatan tersebut berdampak pada pencapaian visi misi Kepala Daerah dimana aparaturnya dituntut memberikan pelayanan prima dan arah pembangunan nasional yang berorientasi salah satunya pada peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk itu perlu dirumuskan strategi untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yaitu dengan mengoptimalkan kerjasama atau koordinasi baik internal maupun eksternal karena keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tupoksi sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis, oleh karena itu Badan Keuangan harus selalu menyesuaikan diri dan berupaya tetap dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan Program yang telah direncanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah dengan memanfaatkan sebaik mungkin peluang yang ada seperti tercapainya opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dalam tujuh tahun berturut-turut atas LKPD Tahun 2013-2019. Hal ini menjadi pemacu dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah ke depannya agar selalu optimal, terukur, akuntabel, transparan dan *reliable*. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah adalah perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara umum sehingga perlu penterjemahan dan penafsiran teknis yang dituangkan dalam regulasi yang merupakan kebijakan Daerah.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi merupakan hal-hal penting dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang direncanakan, sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas terkait dengan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam mengidentifikasi dan memahami dinamisasi pengelolaan keuangan;

Perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan regulasi tersebut berdampak pada perubahan implementasi pelaksanaan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan pendapatan dan anggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan keuangan. Peningkatan sumber daya manusia yang merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

2. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pengelolaan Keuangan Daerah secara sistem masih perlu pengembangan dan belum terintegrasi dalam upaya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal (Ranwal) RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD melalui peraturan kepala daerah. Penetapan program prioritas yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan peningkatan pembangunan ekonomi daerah yang didukung oleh Pengembangan Infrastruktur Daerah, Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Daerah.

Rencana Kerja Badan Keuangan setelah disesuaikan dengan nomenklatur program kegiatan yang baru tertuang dalam Rancangan awal RKPD Tahun 2022 yaitu sejumlah 4 Program dan 14 Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun terdapat penambahan pagu kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang didalamnya terdapat program prioritas Santunan Kematian. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dapat dilihat sesuai tabel 2.4.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	2 BADAN KEUANGAN	3	4	5	6	2 BADAN KEUANGAN	3	4	5	6			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Dalam Setahun	Badan Keuangan	100 %	97,926,400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Dalam Setahun	Badan Keuangan	100 %	22.213.336,697			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100 %	14,726,400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100 %	184.000,000			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan OPD yang disusun	Badan Keuangan	4 Dokumen	14,726,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan OPD yang disusun	Badan Keuangan	4 Dokumen	14.000,000			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun	Badan Keuangan	22 Dokumen			Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun	Badan Keuangan	22 Dokumen				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja OPD yang disusun	Badan Keuangan	7 Dokumen	83,200,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja OPD yang disusun	Badan Keuangan	7 Dokumen	170.000,000			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Dokumen Dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100 %	46,553,699,936	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100 %	19.368.940,697			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pengajian Gaji dan Tunjangan ASN yang disusun	Badan Keuangan	14 Dokumen	46,546,672,936	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengajian Gaji dan Tunjangan ASN yang disusun	Badan Keuangan	14 Dokumen	19.361.659,497			
		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Badan Keuangan	85 Orang			Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Badan Keuangan	85 Orang				
		Jumlah Dokumen Akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun	Badan Keuangan	12 Dokumen	7,027,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun	Badan Keuangan	12 Dokumen	7.281.200			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disusun	Badan Keuangan	12 laporan			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disusun	Badan Keuangan	12 laporan				
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Badan Keuangan	2 laporan			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Badan Keuangan	2 laporan				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin dalam setahun	Badan Keuangan	100 %	247,538,560	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin dalam setahun	Badan Keuangan	100 %	249.600.000			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	85 Buah	100.000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	85 Buah	89.600.000			

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Pagu Indikatif (Rp)
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
		Jumlah Pakain Batik yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	0 Potong		Jumlah Pakain Baik yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	0 Potong			
		Jumlah Pakain Korpri yang di beli / diadakan	Badan Keuangan	85 Stel		Jumlah Pakain Korpri yang di beli / diadakan	Badan Keuangan	85 Potong			
		Jumlah pakaian olah raga yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	85 Stel		Jumlah pakaian olah raga yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	85 Stel			
		Jumlah seperti olahraga yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	0 Pasang		Jumlah seperti olahraga yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	0 Pasang			
		Jumlah Peserta diklat formal	Badan Keuangan	40 Orang	147,538,560	Jumlah Peserta diklat formal	Badan Keuangan	40 Orang		160.000.000	
		Jumlah Diklat dan pelatihan yang diadakan	Badan Keuangan	2 Kali		Jumlah Diklat dan pelatihan yang diadakan	Badan Keuangan	2 Kali			
		Persentase laporan diklat dan pelatihan yang disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100 %		Persentase laporan diklat dan pelatihan yang disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100 %			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Keuangan	100 %	522.948,340	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Keuangan	100 %		532.035.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Keuangan	100 %	12.480.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Badan Keuangan	100 %		15.000.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Keuangan	100 %	105.023.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Keuangan	100 %		150.000.000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Keuangan	2774 Kotak	84.708.000	Jumlah Makanan dan Minuman yang di sediakan	Badan Keuangan	2774 Kotak		69.000.000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Badan Keuangan	48393 Lembar	64.574,640	Jumlah Barang yang di cetak	Badan Keuangan	48393 Lembar		150.000.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Badan Keuangan	20000 Lembar		Jumlah barang yang digandakan	Badan Keuangan	20000 Lembar			
			Badan keuangan	36 Exemplar	36,392,720	Jumlah Surat Kabar Yang di sediakan	Badan keuangan	36 Exemplar		69.000.000	
			Badan Keuangan	12 Buah		Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Badan Keuangan	12 Buah			
			Badan Keuangan	1 Paket		Jumlah Paket Iklan yang disediakan	Badan Keuangan	1 Paket			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Keuangan	60 Kali	219,769,680	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar yang dihadiri/Dikuti	Badan keuangan	60 Kali		170.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Keuangan		678,491,600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Keuangan	0 0		543.761.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diadakan	Badan Keuangan	2 unit	476,300,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diadakan	Badan Keuangan	2 unit	476,300,000		
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	5 Unit	9,762,480	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	5 Unit	9,762,480		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	1 Unit	179,239,840	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	1 Unit	179,239,840		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	30 unit			Jumlah peralatan kerja yang dibeli/diadakan	Badan Keuangan	30 unit			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Badan Keuangan	100 %	1,137,741,280	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Badan Keuangan	100 %	1,137,741,280		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Badan Keuangan	400 Surat	2,600,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Badan Keuangan	400 Surat	2,600,000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang di bayarkan	Badan Keuangan	12 Rekening	389,727,520	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang di bayarkan	Badan Keuangan	12 Rekening	389,727,520		
		Jumlah rekening telepon yang di bayarkan	Badan Keuangan	12 Rekening			Jumlah rekening telepon yang di bayarkan	Badan Keuangan	12 Rekening			
		Jumlah rek. Telepon internet yang di bayarkan	Badan Keuangan	12 Rekening			Jumlah rek. Telepon internet yang di bayarkan	Badan Keuangan	12 Rekening			
		Jumlah rekening air yang dibayar	Badan Keuangan	12 Rekening			Jumlah rekening air yang dibayar	Badan Keuangan	12 Rekening			
		Jumlah Jasa Sewa Hosting / VPN yang dibayar	Badan Keuangan	1 Paket			Jumlah Jasa Sewa Hosting / VPN yang dibayar	Badan Keuangan	1 Paket			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	Badan Keuangan	103 Buah	23,849,280	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli	Badan Keuangan	103 Buah	23,849,280		
		Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan	Badan Keuangan	24 Bulan			Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan	Badan Keuangan	24 Bulan			



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
		3	4	5	6	2	3	4	5	6	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Honor (Jumlah Orang x Bulan)	Badan Keuangan	114 Orang / Bulan	721,564,480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Honor (Jumlah Orang x Bulan)	Badan Keuangan	114 Orang / Bulan	610,000,000	
		Jumlah Pembayaran Lembur (Jumlah Orang x Bulan)	Badan Keuangan	17712 Orang / Jam			Jumlah Pembayaran Lembur (Jumlah Orang x Bulan)	Badan Keuangan	17712 Orang / Jam		
		Jumlah Benda Pos yang Diadakan	Badan Keuangan	816 Buah			Jumlah Benda Pos yang Diadakan	Badan Keuangan	816 Buah		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Badan Keuangan	100 %	178,810,400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Badan Keuangan	100 %	237,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dibayar pajaknya	Badan Keuangan	1 Unit	42,234,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayar pajaknya	Badan Keuangan	1 Unit	45,000,000	
		Jumlah pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (jml unit kendaraan x jml pemeliharaan)	Badan Keuangan	1 Unit / Tahun			Jumlah pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (jml unit kendaraan x jml pemeliharaan)	Badan Keuangan	1 Unit / Tahun		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dibayar pajaknya	Badan Keuangan	39 Unit	54,600,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dibayar pajaknya	Badan Keuangan	39 Unit	52,500,000	
		Jumlah Pemeliharaan Mobil Dinas / Operasional ( jml unit kendaraan x jml Pemeliharaan )	Badan Keuangan	1 Unit / Tahun			Jumlah Pemeliharaan Mobil Dinas / Operasional ( jml unit kendaraan x jml Pemeliharaan )	Badan Keuangan	1 Unit / Tahun		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara (Jml Unit x Jml Pemeliharaan)	Badan Keuangan	45 Kali	30,576,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara (Jml Unit x Jml Pemeliharaan)	Badan Keuangan	45 Kali	15,000,000	
	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	Badan Keuangan	- m2	36,400,000	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	Badan Keuangan	0 m2	25,000,000	
		Jumlah Perbaikan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1 Paket			Jumlah Perbaikan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1 Paket		



NO	Rancangan Awal RKPD						Fasial Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6		
		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang di diverifikasi	Badan Keuangan	47 Dokumen				Badan Keuangan				
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang di susun	Badan Keuangan	47 Dokumen	28.825,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD yang di susun	Badan Keuangan	235 Dokumen	31.850.000		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang di diverifikasi	Badan Keuangan	47 Dokumen				Badan Keuangan				
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang di susun	Badan Keuangan	47 Dokumen	29.978,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang di susun	Badan Keuangan	47 Dokumen	0		
		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang di diverifikasi	Badan Keuangan	47 Dokumen				Badan Keuangan	47 Dokumen			
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang di susun	Badan Keuangan	47 Dokumen	25.506,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang di susun	Badan Keuangan	47 Dokumen	0		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang di diverifikasi	Badan Keuangan	47 Dokumen				Badan Keuangan	47 Dokumen			
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perbup APBD yang disusun dalam 1 Tahun	Badan Keuangan	1 Dokumen	545.680,800	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen yang disusun (Dokumen Perda dan perbup APBD)	Badan Keuangan	2 Dokumen	499.011.000		
		Jumlah Perda APBD yang disusun dalam 1 Tahun	Badan Keuangan	1 Dokumen				Badan Keuangan	1 Dokumen			
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perbup Perubahan APBD yang disusun dalam 1 Tahun	Badan Keuangan	1 Dokumen	342.974,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan perbup APBD yang disusun	Badan Keuangan	9 Dokumen	359.920.400		
		Jumlah Perda Perubahan APBD yang disusun dalam 1 Tahun	Badan Keuangan	1 Dokumen				Badan Keuangan	1 Dokumen			
	Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Bimtek Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1 Kali	265.643,000	Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang dilaksanakan	Badan Keuangan	4 Kali	56.092.000		
		Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan APBD	Badan Keuangan	2 Dokumen				Badan Keuangan	2 Dokumen			
		Jumlah Regulasi yang disusun	Badan Keuangan	1 Dokumen				Badan Keuangan				
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100 %	588.458,416	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan/ Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	12 Dokumen	794.229.500,00		
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas Harian	Badan Keuangan	264 Laporan	113.478,560	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas Harian	Badan Keuangan	264 Laporan	131.478.000		

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3 Jumlah Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4 Badan Keuangan	5 2 laporan	6 5.803,200	2 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3 Jumlah Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yang disusun	4 Badan Keuangan	5 2 laporan	6 5.800.000
			Badan Keuangan				Persentase SILPA ( sudah termasuk jumlah laporan silpa)	Badan Keuangan	6,7 %	
			Badan Keuangan				Persentase SILPA terhadap APBD	Badan Keuangan	15 %	
			Badan Keuangan	14.300 Surat	323,140,480	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan, Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Badan Keuangan	14300 Surat	397.398.500
			Badan Keuangan	1.235 Surat			Jumlah SPD yang diterbitkan	Badan Keuangan	1235 Surat	
			Badan Keuangan	14.300 Surat			Jumlah SPM yang diterbitkan	Badan Keuangan	14300 Surat	
			Badan Keuangan	30 laporan	14,347,008	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan dan Koordinasi Dana Transfer	Badan Keuangan	30 laporan	32.355.000
			Badan Keuangan	4 laporan			Jumlah LKT ( Laporan Konfirmasi Transfer )	Badan Keuangan	4 laporan	
			Badan Keuangan	12 Kali	110,020,560	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunangan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Gaji	Badan Keuangan	12 Kali	195.014,000
			Badan Keuangan	48 laporan			Jumlah Laporan Kas Mingguan	Badan Keuangan	48 laporan	
			Badan Keuangan	4 Kali			Jumlah Pembinaan SKPD	Badan Keuangan	4 Kali	
			Badan Keuangan	28 Kali			Jumlah Rekonsiliasi Gaji	Badan Keuangan	28 Kali	
			Badan Keuangan	450 Surat			Jumlah SKPP yang diterbitkan	Badan Keuangan	450 Surat	
							Persentase Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah APBD	Badan Keuangan	25 %	
			Badan Keuangan	4 Kali	21,668,608	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi BKU	Badan Keuangan	4 Kali	32.404,000
			Badan Keuangan	12 Kali			Jumlah Rekonsiliasi DTH / RTH	Badan Keuangan	12 Kali	
			Badan Keuangan	264 Kali			Jumlah rekonsiliasi Posisi Kas dengan Bank Jatim	Badan Keuangan	264 Kali	
			Badan Keuangan	4 Laporan			Jumlah Rekonsiliasi SPJ Fungsional	Badan Keuangan	4 Laporan	

Hasil Analisis Kebutuhan										
Rancangan Awal RKPD										
NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2	3	4	5	6	3	4	5	6
		Persentase pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan verifikasi	Badan Keuangan	100 %	1,402,232,760	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan Sesuai SAP	Badan Keuangan	2 Dokumen	948.275.000
		Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100 %						
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi akuntansi Penerimaan Kas Daerah	Badan Keuangan	12 Kali	221,955,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah koordinasi akuntansi Penerimaan Kas Daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	168 Kali	121.955.000
		Jumlah pelaksanaan koordinasi akuntansi Pengeluaran Kas Daerah	Badan Keuangan	13 Kali			Jumlah koordinasi akuntansi Pengeluaran Kas Daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	564 Kali	
		Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan	Badan Keuangan	12 Kali			Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan	Badan Keuangan	14000 Kali	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembayaan	Badan Keuangan	180 Kali	122,670,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembayaan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	612 Kali	122.670.000
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	6 Kali			Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang disusun	Badan Keuangan	67 Laporan	0
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Badan Keuangan	47 laporan	203,193,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang disusun	Badan Keuangan	67 laporan	140.620.000
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun	Badan Keuangan	170 Laporan	
							Persentase Program Kegiatan yang tidak terlaksana	Badan Keuangan	10 %	
							Persentase Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	Badan Keuangan	1 %	
							Rasio anggaran sisa thd total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Badan Keuangan	0,1 %	
							Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik	Badan Keuangan	1% Kali	
							Jumlah Dokumen yang dapat di akses publik thd informasi keuda	Badan Keuangan	100% Dokumen	

Hasil Analisis Kebutuhan										
Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Keuangan	2 Dokumen	153,653,760	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab	Badan Keuangan	2 Dokumen	44,776,000
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Badan Keuangan	12 Dokumen	109,778,000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Badan Keuangan	2 Dokumen	44,776,000
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	Badan Keuangan	2 Dokumen	134,789,000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	Badan Keuangan	2 Dokumen	109,758,000
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akuntansi Pemerintah	Badan Keuangan	2 Kali	456,194,000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Badan Keuangan	3 Kali	236,194,000
	5.02.02.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100 %	411,798,728,000	5.02.02.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dlm setahun	Badan Keuangan	100 %	473,065,319,144
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Sarpras pedesaan	Badan Keuangan	213 Desa	399,852,691,000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah desa yang mendapatkan ADD	Badan Keuangan	213 Desa	452,909,660,848
		Jumlah Laporan Alokasi dan Penyaluran Bantuan	Badan Keuangan	4 Kali			Jumlah desa yang mendapatkan SARPRAS	Badan Keuangan	213	
							Jumlah desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan BENA MITRA	Badan Keuangan	9	
							Jumlah RT yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RT	Badan Keuangan	5604	
							Jumlah RW yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RW	Badan Keuangan	1212	
							Jumlah Laporan Bantuan Keuangan yang disusun	Badan Keuangan	12	
							persentase belanja urusan pemerintahan umum ( dikurangi transfer Expenditures )	Badan Keuangan	1 %	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah desa yang mendapatkan dana bagi hasil pajak daerah	Badan Keuangan	213 Desa	11,411,630,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Badan Keuangan	10 Dokumen	11,411,630,000
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Jumlah desa yang mendapatkan dana bagi hasil pajak daerah	Badan Keuangan	213 Desa	534,407,000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten Kota	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Badan Keuangan	10 Dokumen	8,744,028,297

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6		3	4	5	6		
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dalam setahun	Badan Keuangan	100 %	25.000.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data Kab.Kota dan Desa yang dikelola	Badan Keuangan	100 %	25.000.000		
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	2 Kali	25.000.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	2 Kali	25.000.000		
		Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	2 Kali								
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Badan Keuangan	100 %	1.686.927.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Badan Keuangan	85 %	1.686.927.000		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100 %	1.686.927.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	85 %	1.686.927.000		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1 Kali	183.480.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD	Badan Keuangan	47	183.480.000		
		Jumlah dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	2 Dokumen			Jumlah SK Penetapan Status Penggunaan yang disusun	Badan Keuangan	47			
		Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD	Badan Keuangan	47 Laporan			Jumlah dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	2			
		Jumlah SK, Penetapan Status Penggunaan yang disusun	Badan Keuangan	47 Laporan			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	35			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah inventarisasi jenis BMD yang dicatat	Badan Keuangan	5 Laporan	361.816.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah inventarisasi jenis BMD yang dicatat	Badan Keuangan	5	249.000.000		
							Jumlah daftar aset tetap yang disusun	Badan Keuangan	5			
							Jumlah Dokumen manual untuk menyusun daftar aset tetap	Badan Keuangan	1			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Jumlah dokumen asli kepemilikan BMD yang disimpan Jumlah monitoring dan evaluasi pengamanan BMD yang dilaksanakan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan	5 2 Dokumen 4 Kali 5 Dokumen 30 Dokumen	6 375.525.000 607.978.000 158.128.000	2 Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengamanan BMD yang kepemilikan BMD yang disimpan Jumlah dokumen usulan pemindahtanganan yang ditindaklanjuti Jumlah dokumen usulan pemindahtanganan yang dilaksanakan Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik Jumlah Rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan	4 Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan	4 Dokumen 2 Dokumen 30 Dokumen 5 Dokumen 4 Kali	6 266.878.500 246.000.000 119.160.000



Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan								
NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
			Badan Keuangan				Jumlah Dokumen Nilai Aset yang disusun	Badan Keuangan	5 Dokumen	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kategori Baik	Badan Keuangan	100 %	3,594,419,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap APBD	Badan Keuangan	8 %	2.197.209.000
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyusunan Perda/Perbup tentang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan	100 %	3,594,419,000	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD Dibanding Tahun sebelumnya	Badan Keuangan	2 %	2.197.209.000
		Persentase Laporan/Pendapatan Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100 %						
		Persentase kegiatan intensifikasi Pajak Daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	100 %						
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi kegiatan Perencanaan Pendapatan	Badan Keuangan	1 Dokumen	351,000,000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Fasilitas dan koordinasi kegiatan Perencanaan Pendapatan	Badan Keuangan	10 kali	70.930.000
		Jumlah Pendampingan	Badan Keuangan	2 Kali			Jumlah pendampingan Aplikasi PBB dan BPHB yang di	Badan Keuangan	2 Kali	
		Jumlah Survey Potensi Pajak Daerah	Badan Keuangan	1.000 Wajib Pajak				Badan Keuangan		
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Bimtek yang diselenggarakan	Badan Keuangan	1 Dokumen	219,000,000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Pajak yang diselenggarakan	Badan Keuangan	35 orang (1x35)	72.332.000
		Jumlah Koordinasi tentang pengembangan Pajak Daerah	Badan Keuangan	2 Kali			jumlah koordinasi tentang pengembangan daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	3 kali	
	Pendataan dan Pendaftran Objek Pajak Daerah	Jumlah Honor TIM	Badan Keuangan	1 Kali	156,480,000	Pendataan dan Pendaftran Objek Pajak Daerah	Jumlah Potensi wajib pajak daerah yang di survey	Badan Keuangan	1000	84.960.000
		Jumlah Pendataan dan Pendaftran Obyek Pajak Daerah	Badan Keuangan	3 Dokumen			Jumlah Obyek Pajak Daerah yang di data dan di daftarkan	Badan Keuangan	1500	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Monitoring Pendapatan Daerah dan PBB	Badan Keuangan	19 Kali	343,320,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah monitoring pendapatan daerah dan PBB yang dilaksanakan	Badan Keuangan	12 Kali	12.340.000
		Jumlah Pemeriksaan Obyek Pajak Daerah	Badan Keuangan	12 Kali			Jumlah pemeriksaan objek pajak daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	12 Kali	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2 Penetapan Wajib Pajak Daerah	3 Jumlah Aplikasi Pajak daerah yang dipelihara Jumlah DHKP, SPT dan SKPD yang dicetak Jumlah Himpunan Pajak ( Brosur, Pamflet, dll) Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan Jumlah Pajak yang ditetapkan Jumlah Pendampingan Jumlah SPT dan SKPD yang dicetak	4 Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan	5 1 Aplikasi 10 Box 1.000 Lembar 615.750 OP 6.600 WP 2 Kali 655.000 Lembar	6 1.430.936,000	2 Penetapan Wajib Pajak Daerah	3 Jumlah aplikasi pajak daerah yang dipelihara Jumlah DHKP, SPT dan SKPD yang dicetak Jumlah himbunan pajak yang di cetak Jumlah obyek, pajak yang ditetapkan Jumlah pendampingan Penetapan Wajib Pajak Daerah yang dilaksanakan Jumlah SPT dan SKPD yang dicetak	4 Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan	5 3 Aplikasi 652460 Lembar 1000 Lembar 615750 OP 2 kali 652400 lembar	6 992.863.000
		Jumlah Konsultasi Pajak Daerah	Badan Keuangan	4 Kali	45.694,000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah konsultasi pajak daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	4 Kali	39.790,000
		Jumlah Pendampingan Pajak Daerah	Badan Keuangan	4 Kali			Jumlah Pendampingan Pajak Daerah	Badan Keuangan		
		Jumlah Laporan Pendapatan Daerah yang disampaikan Tepat Waktu	Badan Keuangan	12 laporan	112.172,000	Pensharian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Deviasi realisasi PAD Ihd anggaran PAD dalam APBD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	0,86 %	81.113.000
		Jumlah kegiatan intensifikasi Pajak Daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	195 Kali	283.092,000	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan intensifikasi / penagihan Pajak daerah dilaksanakan	Badan Keuangan	240 Kali	160.218.000
		Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Badan Keuangan	24 laporan	652.725,000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Badan Keuangan	12 laporan	682.663.000
							Jumlah dokumen Realisasi PBB yang di publikasikan di website	Badan Keuangan	1 Dokumen	
							Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik	Badan Keuangan	5 Kali	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Badan Keuangan merupakan OPD teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum fungsi penunjang urusan keuangan dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan ( Musrenbangdes / Musrenbangkel ). Usulan yang lolos verifikasi pada musrenbangdes/musrenbangkel diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) untuk dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbangkec diteruskan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten ( MusrenbangKab ) untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan prioritas pemabngunan Kabupaten.

Badan Keuangan selaku SKPD tidak menampung usulan dari masyarakat ke dalam program dan kegiatan sehingga pada Renja Badan Keuangan tidak tercantum. Pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat fungsi selaku PPKD, namun masih terdapat belanja yang diakomodir dalam program kegiatan dan sub kegiatan misalnya belanja Bantuan Keuangan, pengelolaan Dana Bagi Hasil serta Dana Darurat dan Mendesak.

**Tabel 2.5**

**Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Ngawi**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2  <b>NIHIL</b>	3	4	5	6

**BAB III**  
**TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. Memperhatikan dan mengacu pada hasil telaah RPJMN Tahun 2020-2024, RKP Nasional Tahun 2022, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Ngawi, dan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Ngawi Periode 2005- 2025, maka Tema Pembangunan Kabupaten Ngawi tahun 2022 adalah : “Mempercepat pemulihan perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan pemenuhan infrastruktur dasar”. Selanjutnya, tema pembangunan di atas akan di terjemahkan melalui beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi di tahun 2022, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM dan pengembangan pendidikan vokasi pertanian ramah lingkungan;
2. Pengembangan pertanian, agrowisata, industri pengolahan berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro berbasis pertanian;
4. Peningkatan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian; dan
5. Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik.

Selanjutnya, di bawah ini akan disajikan tabel keselarasan antar dokumen perencanaan dari level Nasional hingga Kabupaten Ngawi dalam rangka merumuskan dokumen RKPD Tahun 2022 Kabupaten Ngawi.

<b>RKP Tahun 2022</b>	<b>Keselarasan</b>	<b>RKPD Provinsi Jawa Timur 2022</b>
Tema : Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural		Tema : Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro
<b>Prioritas Pembangunan</b>		<b>Prioritas Pembangunan</b>
- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;	→	- Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;	→	- Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;	→	- Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;
- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;	→	- Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
- Memperkuat Infrastruktur untuk	→	- Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan

Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;		Sumber Daya Energi;
- Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;	→	- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	→	- Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

(Sumber : Diolah oleh Tim Penyusun, 2021)

Gambar 4. Keselarasan Antara RKP Tahun 2022 & RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

<b>RKPD Provinsi Jawa Timur 2022</b>	<b>Keselarasan</b>	<b>RKPD Kabupaten Ngawi 2022</b>
Tema: Peningkatan dan Pemerataan Kualitas SDM untuk Mendukung Daya Saing Daerah untuk Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Tema: Mempercepat pemulihan perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan pemenuhan infrastruktur dasar
<b>Prioritas Pembangunan</b>		<b>Prioritas Pembangunan</b>
- Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;	→	- Peningkatan SDM dan pengembangan pendidikan vokasi pertanian ramah lingkungan.
- Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;		- Pengembangan pertanian, agrowisata, industri pengolahan berbasis pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;		- Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro berbasis pertanian.
- Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;		- Peningkatan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian.
- Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;	→	- Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik.
- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;		
- Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.	→	

(Sumber : Diolah oleh Tim Penyusun, 2021)

Gambar 4. Keselarasan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 & RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2022

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Mengacu Pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ngawi 2016-2021, Badan Keuangan bertanggungjawab Mendukung Misi Ke 3 Yaitu Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan Tujuan Badan Keuangan yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (peringkat Baik).

Tujuan tersebut menjadi pedoman dalam menyusun renja agar semua program dan kegiatan yang tercantum pada Renja searah dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan Renja Badan Keuangan sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dan koridor bagi unsur pelaksana program dan kegiatan dalam menjalankan program dan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mendukung program yang tercantum pada RPJMD;

2. Sebagai bahan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap indikator program dan kegiatan yang ditetapkan.

TABEL 4.1

**Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PD Badan Keuangan Tahun 2021  
dan Prakiraan Maju Tahun 2022  
KABUPATEN NGAWI**

OPD : (4.02.01) BADAN KEUANGAN

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	3	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			4	5	6	7	8	9	10
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>KEUANGAN</b>				<b>501.574.856.742</b>				<b>514.740.902.500</b>
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Dalam Setahun	Badan Keuangan	100 %	22.213.336.697			100 %	22.453.800.000
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100 %	184.000.000			100 %	196.000.000
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	Badan Keuangan	12 Dokumen	14.000.000			12 Dokumen	16.000.000
		Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun	Badan Keuangan	4 Dokumen				12 Dokumen	-
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Dokumen kinerja OPD yang disusun	Badan Keuangan	6 Dokumen	170.000.000			12 Dokumen	180.000.000
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100 %	19.368.940.697			100 %	19.374.000.000
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN Yang disusun	Badan Keuangan	28 Dokumen	19.361.659.497			14 Dokumen	19.365.000.000
		Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Badan Keuangan	1120 Orang				85 Orang	-
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Akutansi dan pelaporan keuangan yang disusun	Badan Keuangan	0 Dokumen	7.281.200			12 Dokumen	9.000.000
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disusun	Badan Keuangan	48 laporan				12 laporan	-







					Jumlah Benda Pos yang Diadakan	Badan Keuangan	0 Buah				816	Buah	-
5	02	01	2.09	09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun</b>	<b>100 %</b>	<b>237.500.000</b>				<b>100 %</b>	<b>273.500.000</b>
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayar pajaknya	- Unit	45.000.000				1 Unit	50.000.000
						Jumlah pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (jml unit kendaraan x jml pemeliharaan)	- Unit / Tahun					1 Unit / Tahun	-
						Jumlah Kendaraan Jabatan yang dibayar Pajaknya	1 Unit						
						Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Jabatan	4 Kali						
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dibayar pajaknya	- Unit	52.500.000				39 Unit	55.500.000
						Jumlah Pemeliharaan Mobil Dinas / Operasional ( jml unit kendaraan x jml Pemeliharaan )	- Unit / Tahun					1 Unit / Tahun	18.000.000
						Jumlah Kendaraan Jabatan yang di bayar Pajaknya	39 Unit						
						Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	12 Kali						
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Meubelair	15 Kali	15.000.000					
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara (Jml Unit x Jml Pemeliharaan)	45 Kali	25.000.000				45 Kali	30.000.000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan gedung kantor yang dipelihara	300 m2	100.000.000				- m2	120.000.000
						Jumlah Perbaikan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan	- Paket					1 Paket	-

5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang dipelihara ( jml unit x jml pemeliharaan)	- Unit	0	15 Unit	-
5	02	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Prosentase Dokumen Penyusunan Anggaran APBD yang disusun sesuai regulasi dan tepat waktu</b>	- %	476.098.472.545	100 %	488.945.102.500
						<b>Persentase Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan Tepat Waktu</b>	100 %			
5	02	02	2.01		<b>5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Regulasi Penyusunan Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu</b>	100 %	1.268.648.900	100 %	1.425.702.500
						Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu	100 %		100 %	-
						Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil Pembinaan	100 %		100 %	-
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA yang disusun	0 Dokumen	241.820.000	1 Dokumen	247.000.000
						Jumlah Dokumen PPAS yang disusun	0 Dokumen		1 Dokumen	-
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	94 Dokumen			
						Persentase Belanja Kesehatan	10 %			
						Persentase Belanja Pendidikan	20 %			
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA yang disusun	1 Dokumen	57.405.500	1 Dokumen	65.500.000
						Jumlah Dokumen Perubahan PPAS yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	-
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	94 Dokumen			
						Persentase Belanja Kesehatan	10 %			
						Persentase Belanja Pendidikan	20 %			

5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang di susun	Badan Keuangan	47 Dokumen	22.550.000			47 Dokumen	26.500.000
						Jumlah Dokumen RKA SKPD yang di diverifikasi	Badan Keuangan	- Dokumen				47 Dokumen	-
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang di susun	Badan Keuangan	- Dokumen	31.850.000			47 Dokumen	35.500.000
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang di diverifikasi	Badan Keuangan	- Dokumen				47 Dokumen	-
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD yang disusun		235 Dokumen					
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang di susun	Badan Keuangan	47 Dokumen	0			47 Dokumen	64.973.750
						Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diverifikasi	Badan Keuangan	47 Dokumen				47 Dokumen	-
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang di susun	Badan Keuangan	47 Dokumen	0			47 Dokumen	55.728.750
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Badan Keuangan	47 Dokumen				47 Dokumen	-
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perub APBD yang disusun dalam 1 Tahun	Badan Keuangan	- Dokumen	499.011.000			1 Dokumen	504.000.000
						Jumlah Perda APBD yang disusun dalam 1 Tahun	Badan Keuangan	- Dokumen				1 Dokumen	-
						Jumlah Dokumen Informasi Keuangan Daerah yang dapat diakses Publik		1 Dokumen					
						Jumlah Dokumen yang disusun ( Dokumen Perda dan Perub APBD )		2 Dokumen					
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perub Perubahan APBD yang disusun dalam 1 Tahun	Badan Keuangan	- Dokumen	359.920.400			1 Dokumen	365.000.000
						Jumlah Perda Perubahan APBD yang disusun dalam 1 Tahun	Badan Keuangan	- Dokumen				1 Dokumen	-
						Jumlah Dokumen Informasi Keuangan Daerah yang dapat diakses Publik		1 Dokumen					

5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen yang disusun ( APBD )	Badan Keuangan	9 Dokumen	56.092.000			1	Kali	61.500.000
						Jumlah Bimtek Peraturan Perundang - undangan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	0 Kali				2	Dokumen	-
						Jumlah Dokumen Pedoman Umum Penyusunan APBD	Badan Keuangan	0 Dokumen				1	Dokumen	-
						Jumlah Regulasi yang disusun	Badan Keuangan	0 Dokumen						
						Jumlah Dokumen SBU yang disusun	Badan Keuangan	2 Dokumen						
						Jumlah Koordinasi Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran yang dilaksanakan	Badan Keuangan	4 Kali						
5	02	02	2.02	02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100 %	794.229.500				100 %	815.800.000
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas Harian Yang disusun	Badan Keuangan	264 Laporan	131.478.000				264 Laporan	136.000.000
5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang disusun	Badan Keuangan	2 laporan	5.580.000				2 laporan	7.500.000
						Persentase SILPA ( sudah termasuk Jumlah Laporan Silpa )	Badan Keuangan	6,7 %						402.500.000
						Persentase SILPA terhadap APBD	Badan Keuangan	15 %						
5	02	02	2.02	03	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Badan Keuangan	14.500 Surat	397.398.500				14.300 Surat	35.000.000
						Jumlah SPD yang diterbitkan	Badan Keuangan	188 Surat					1.235 Surat	-
						Jumlah SPM yang diterbitkan	Badan Keuangan	14.500 Surat					14.300 Surat	-
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan dan Koordinasi Dana Transfer yang disusun	Badan Keuangan	30 laporan	32.355.000				30 laporan	35.000.000
						Jumlah LKT ( Laporan Konfirmasi Transfer )	Badan Keuangan	4 laporan					4 laporan	-

5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Gaji	Badan Keuangan	12 Kali	195.014.000	12 Kali	199.500.000
						Jumlah Laporan Kas Mingguan	Badan Keuangan	48 laporan		48 laporan	-
						Jumlah Pembinaan SKPD	Badan Keuangan	4 Kali		4 Kali	-
						Jumlah Rekonsiliasi Gaji	Badan Keuangan	4 Kali		28 Kali	-
						Jumlah SKPP yang diterbitkan	Badan Keuangan	450 Surat		450 Surat	-
						Persentase Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Keseharian terhadap Jumlah APBD		25 %			
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi BKU yang dilaksanakan	Badan Keuangan	4 Kali	32.404.000	4 Kali	35.300.000
						Jumlah Rekonsiliasi DTH / RTH yang dilaksanakan	Badan Keuangan	12 Kali		12 Kali	-
						Jumlah rekonsiliasi Posisi Kas dengan Bank Jatim yang dilaksanakan	Badan Keuangan	264 Kali		264 Kali	-
						Jumlah Rekonsiliasi SPJ Fungsional yang Dilaksanakan		4 Laporan		4 Laporan	-
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan verifikasi		- %	945.275.000	100 %	975.600.000
						Persentase Laporan/ Dokumen yang disusun sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	- %		100 %	-
						Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP		100 %			

5	02	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi akuntansi Penerimaan Kas Daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	168 Kali	121.955.000			12 Kali	125.400.000
							Jumlah pelaksanaan koordinasi akuntansi Pengeluaran Kas Daerah yang dilaksanakan	Badan Keuangan	564 Kali				13 Kali	-
							Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan		14.000 Kali				12 Kali	-
5	02	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Badan Keuangan	- Kali	122.670.000			180 Kali	126.700.000
							Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan Yang dilaksanakan		612 Kali	0				
5	02	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	6 Kali	0			6 Kali	-
5	02	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Badan Keuangan	- laporan	140.620.000			47 laporan	144.500.000
							Jumlah Dokumen yang dapat Diakses Publik terhadap informasi Keuangan Daerah		1 Dokumen					
							Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda yang Disusun		67 Laporan					
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran yang disusun		170 Laporan					
							Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik		1 Kali					
							Persentase Devisi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD		1 %					







5	02	02	02	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	2 Kali	25.000.000			2 Kali	28.000.000
						Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	- Kali				2 Kali	
5	02	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib</b>	<b>Badan Keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>1.065.838.500</b>			<b>100 %</b>	<b>1.097.600.000</b>
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	100 %	1.065.838.500			100 %	1.108.472.040
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1 Kali	184.800.000			1 Kali	195.000.000
						Jumlah dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	2 Dokumen				2 Dokumen	-
						Jumlah SKPD yang menyampaikan RKMD	Badan Keuangan	47 Laporan				47 Laporan	-
						Jumlah SK Penetapan Status Penggunaan yang disusun	Badan Keuangan	47 Laporan				47 Laporan	-
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah inventarisasi jenis BMD yang dicatat	Badan Keuangan	5 Laporan	249.000.000			5 Laporan	255.500.000
						Jumlah Daftar Aset tetap yang disusun		5 Dokumen					
						Jumlah Dokumen Manual Untuk Menyusun Daftar aset tetap		- Dokumen					
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen asli kepemilikan BMD yang disimpan	Badan Keuangan	4 Dokumen	266.878.500			2 Dokumen	270.600.000
						Jumlah Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pengamanan BMD yang dilaksanakan		2 Laporan				4 Kali	-
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen usulan pemindahtanganan yang dilaksanakan	Badan Keuangan	5 Dokumen	246.000.000			5 Dokumen	251.500.000



					Jumlah Survey Potensi Pajak Daerah	Badan Keuangan	- Wajib Pajak			240 kali	1.000 Wajib Pajak	-
					Jumlah Pendampingan Aplikasi PBB dan BPHTB yang Dilaksanakan		2 Kali					
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Badan Keuangan	1 Kali	72.332.000			1 Dokumen	77.000.000
					Jumlah Koordinasi tentang pengembangan Pajak Daerah yang Dilaksanakan		3 Kali				2 Kali	-
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Badan Keuangan	- Kali	84.960.000			1 Kali	91.000.000
					Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah		- Dokumen				3 Dokumen	-
					Jumlah Obyek Pajak Daerah yang di data dan di daftarkan		1.500 Obyek Pajak					
					Jumlah Potensi Wajib Pajak Daerah yang disurvei		1.000 Wajib Pajak					
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Badan Keuangan	12 Kali	12.340.000		12 kali	19 Kali	16.300.000
					Jumlah Pemeriksaan Obyek Pajak Daerah yang dilaksanakan		12 Kali				12 Kali	-
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		3 Aplikasi	992.863.000			1 Aplikasi	996.700.000
					Jumlah DHKP, SPPT dan SKPD yang dicetak		652.460 Lembar				10 Box	-
					Jumlah Himbauan Pajak ( Brosur, Pamflet,dll)yang dicetak		10.000 Lembar				1.000 Lembar	-
					Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan		615.750 OP				615.750 OP	-
					Jumlah Pajak yang ditetapkan		- WP				6.600 WP	-
					Penetapan Wajib Pajak Daerah		2 Kali				2 Kali	-
					Jumlah SPPT dan SKPD yang dicetak		652.400 Lembar				655.000 Lembar	-
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		4 Kali	39.790.000			4 Kali	44.800.000
					Jumlah Pendampingan Pajak Daerah		- Kali				4 Kali	-

5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Peleporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pendapatan Daerah yang disampaikan Tepat Waktu	- laporan	81.113.000	12 laporan	86.200.000
						Persentase Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD yang disusun tepat Waktu	0,86 %			
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan intensifikasi Pajak Daerah yang dilaksanakan	- Kali	160.218.000	195 Kali	166.200.000
						Jumlah Kegiatan Intensifikasi ? Penagihan Pajak daerah yang dilaksanakan	240 Kali			
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	24 laporan	682.663.000	24 laporan	690.000.000
						Jumlah Dokumen Realisasi PBB yang di Publikasikan di Website	1 Dokumen			
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	12 laporan			
						Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik	5 Kali			

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Ngawi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.01.0000 BADAN KEUANGAN  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.01.0000 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Praktiran Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
												Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5		<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>												
5	02	<b>KEUANGAN</b>												
5	02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												
5	02 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												
5	02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun	Meningkatnya Kualitas Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0 %	4 Dokumen 11 Dokumen	100 %	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	16.000.000
5	02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen kinerja OPD yang disusun	Meningkatnya Kualitas Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0 %	6 Dokumen	100 %	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	180.000.000
5	02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												
5	02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0 %	1120 Orang 28 Dokumen	100 %	19.361.659.497	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	19.365.000.000
5	02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0 %	48 Laporan 2 Laporan	100 %	7.281.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	9.000.000
5	02 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												
5	02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik yang dibeli/diadakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0 %	80 Potong 240 Meter 80 Ste; 80 pasang	100 %	89.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	100.000.000
5	02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/ Sosialisasi/Bimtek	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0 %	150 Orang 2 Kali	100 %	160.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	175.000.000
5	02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												
									<b>532.035.000</b>					<b>560.500.000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Ngawi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023			
						Indikator Kinerja	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
													Target	Tolok Ukur
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Peningkatan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	0 %	100 %	100 %	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	16.500.000
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Persentase pemenuhan kebutuhan ATK	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	0 %	100 %	100 %	100 %	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	165.000.000
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah air isi ulang yang disediakan Jumlah Makanan yang di sediakan Jumlah minuman botol yang disediakan Jumlah Minuman yang di sediakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	0 %	100 %	100 %	100 %	69.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	79.000.000
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah barang yang di cetak Jumlah barang yang digandakan Jumlah iklan/publikasi media cetak	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	0 %	100 %	100 %	100 %	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	70.000.000
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Buku Peraturan Perundang undangan yang disediakan Jumlah Surat Kabar yang di sediakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	0 %	100 %	100 %	100 %	63.035.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	65.000.000
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam yang dihadiri/Dikuti Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar yang dihadiri/Dikuti	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	0 %	100 %	100 %	100 %	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	185.000.000
<b>5 02 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>543.761.000</b>				<b>605.000.000</b>
5 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah kendaraan jabatan yang diadakan	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Barang Milik daerah Dalam Setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	0 %	100 %	100 %	100 %	313.761.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	350.000.000



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Ngawi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah meubelair yang dibeli/diadakan	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Barang Milik daerah Dalam Setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0 %	8 Unit	100 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	30,000,000 (Rp.)
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Barang Milik daerah Dalam Setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0 %	30 Unit	100 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	195,000,000
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Barang Milik daerah Dalam Setahun	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0 %	5 Unit	100 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	30,000,000
5.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>1,149,800,000</b>
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah surat yang dikirim	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0 %	400 Surat	100 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	2,800,000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Jasa Sewa Hosting / VPN yang dibayar Jumlah pemasangan daya listrik Jumlah penambahan daya listrik Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah rekening listrik yang di bayarkan Jumlah rekening telepon yang di bayarkan Jumlah rek internet yang di bayarkan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	1 Paket 0 Paket 0 Paket 12 Rekening 12 Rekening 36 Rekening 36 Rekening	100 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	470,000,000
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah alat kebersihan yang dibeli Jumlah bahan kebersihan yang dibeli Jumlah pembayaran jasa keanamanan Jumlah pembayaran jasa kebersihan Jumlah pembayaran jasa operator	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	0 %	103 Buah 25 Buah 0 OB 24 kali 0 OB	100 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	27,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Ngawi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.01.0000 BADAN KEUANGAN  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.01.0000 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Praktiran Maju Rencana Tahun 2023				
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
												Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah Pembayaran Honor (Jumlah Orang x Bulan) Jumlah Pembayaran Lembur (Jumlah Orang x Hari)	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	0 %	168 08 738 0H	100 %	610,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	650,000,000
5 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>237,500,000</b>					<b>273,500,000</b>
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya Jumlah pemeliharaan kendaraan jabatan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	0 %	1 Unit 4 Kali	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	50,000,000
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	0 %	39 Unit 12 Kali	100 %	52,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	55,500,000
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah pemeliharaan meubelair	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	0 %	15 Kali	100 %	15,000,000	PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	18,000,000
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	0 %	45 Kali	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	30,000,000
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Luasan gedung kantor yang dipelihara	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	0 %	300 M2	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	0 %	120,000,000
5 02 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>								<b>476,098,472,544</b>					<b>488,945,102,500</b>
5 02 02 2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>								<b>1,268,648,900</b>					<b>1,425,702,500</b>
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPA5	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPA5 yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100 %	94 Dokumen 10 % 20 %	100 %	241,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	247,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Ngawi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Pendang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 %	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	94 Dokumen	100 %	57,405,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	65,500,000	
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 %	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	47 Dokumen	100 %	22,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	26,500,000	
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 %	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	235 Dokumen	100 %	31,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	35,500,000	
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 %	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	47 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN TRANSFER	100 %	64,973,750	
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 %	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	47 Dokumen	100 %	0	PENDAPATAN TRANSFER	100 %	55,728,750	
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Informasi Keuangan daerah yang dapat diakses publik	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 %	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	1 Dokumen	100 %	499,011,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	504,000,000	
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Informasi Keuangan daerah yang dapat diakses publik	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 %	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	1 Dokumen	100 %	359,920,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	365,000,000	
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan P-APBD yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen SBU yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 %	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	2 Dokumen	100 %	56,092,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	61,500,000	
5 02 02 2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>								<b>794,229,500</b>			<b>815,800,000</b>	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Ngawi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												85 %	264 Laporan	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	85 %	264 Laporan	100 %	131,478,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	85 %	136,000,000	
5 02 02 2.02 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	85 %	2 Laporan 6.7 % 15 %	100 %	5,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	85 %	7,500,000	
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pemberitaan Anggaran Kas dan SPD	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah SP2D yang diterbitkan Jumlah SPD yang diterbitkan Jumlah SPM yang diteliti	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	85 %	14500 Surat 188 Surat 145000 Surat	100 %	397,398,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	85 %	402,500,000	
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Laporan dan koordinasi Dana Transfer yang disusun Jumlah LKT ( Laporan Konfirmasi Transfer )	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	85 %	30 Laporan 4 Laporan	100 %	32,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	85 %	35,000,000	
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Laporan Gaji Jumlah Laporan Kas Mingguan Jumlah Pembinaan SKPD Jumlah Rekonsiliasi Gaji Jumlah SKPP yang diterbitkan Persentase Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah APBD	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	85 %	12 laporan 48 Laporan 4 Kali 4 Kali 450 Surat 25 %	100 %	195,014,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	85 %	199,500,000	
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi terkait	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	Jumlah Rekonsiliasi BKU yang dilaksanakan Jumlah Rekonsiliasi DTH/RTH yang dilaksanakan Jumlah Rekonsiliasi Posisi Kas dengan Bank Jatim yang dilaksanakan Jumlah Rekonsiliasi SPJ Fungsional yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	85 %	4 Kali 12 Kali 264 Kali 4 Laporan	100 %	32,404,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD	85 %	35,300,000	
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								945,275,000				975,600,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Ngawi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.01.0000 BADAN KEUANGAN  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.00.01.0000 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Target Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Ukur		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Jumlah pelaksanaan koordinasi akuntansi Penerimaan Kas Daerah yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 %	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	168 Kali 564 Kali 14000 Kali	100 %	121.955.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	100 %	125.400.000	
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Jumlah pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Belanja Serta Pembiayaan yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 %	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	612 Kali	100 %	122.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	100 %	126.700.000	
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Jumlah Dokumen yang dapat di akses publik thd informasi keuda Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang disusun Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik Persentase Devisi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD Persentase Program Kegiatan yang tidak terlaksana Rasio anggaran sisa thd total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	100 %	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	1 Dokumen 67 Laporan 170 laporan 1 Kali 1 % 10 % 0.1 %	100 %	140.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	100 %	144.500.000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Ngawi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0000 BADAN KEUANGAN  
Sub Unit Organisasi : 5.02.00.00.00.01.0000 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Praktiran Maju Rencana Tahun 2023		
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
												Tolok Ukur	Target
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rambu-rambu/Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	9 Dokumen	100 %	169.302.000	Dana Transfer Umum-Alokasi Umum		100 %	174.000.000
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	2 Dokumen	100 %	44.776.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	46.600.000
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	5 Dokumen	100 %	109.756.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	113.400.000
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi/Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggi	100 %	3 Kali	100 %	236.194.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	243.000.000
5 02 02 2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>								<b>473.065.319,144</b>				<b>485.700.000,000</b>
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	Jumlah desa yang mendapatkan SARPRAS Jumlah desa yang mendapatkan ADD Jumlah desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan BINA MITRA Jumlah Laporan Bantuan Keuangan yang disusun Jumlah RT yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RT Jumlah RW yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RW persentase belanja urus pemertahan umum (( dikurangi transfer Expenditures )	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ngawi	100	213 Desa 213 desa 9 Desa 12 laporan 5604 RT 1212 Tahun 1 %	100 %	452.909.660,648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Desa		100	465.200.000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Ngawi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	Jumlah SP2D yang diterbitkan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100	10 Dokumen	100 %	11,411,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	100	11,500,000,000
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	Jumlah SP2D yang diterbitkan Persentase Jumlah Bagi Hasil Kab/Kota dan Desa yang dikelola	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Semua Kab./Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	10 Dokumen	100 %	8,744,028,297	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	100	9,000,000,000
5 02 02 2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>											<b>28,000,000</b>		
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	Jumlah Pemeliharaan yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100	2 Kali	100 %	25,000,000	PENDAPATAN TRANSFER		Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Baik	100	28,000,000
5 02 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>											<b>1,065,838,500</b>		
5 02 03 2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>											<b>1,065,838,500</b>		
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Jumlah Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD yang dilaksanakan Jumlah dokumen pengajuan usulan pemanfaatan BMD yang dilaksanakan Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD Jumlah SK Penetapan Status Penggunaan yang disusun yang disusun	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100	1 Kali 2 Dokumen 47 Laporan 47 Laporan	100 %	184,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	100	195,000,000
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Jumlah daftar aset tetap yang disusun Jumlah Dokumen manual untuk menyusun daftar aset tetap Jumlah inventarisasi jenis BMD yang dicatat	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100	5 Dokumen 0 Dokumen 5 Laporan	100 %	249,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	100	255,500,000
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Jumlah dokumen asli kepemilikan BMD yang disimpan Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengamanan BMD yang dilaksanakan	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketangg	100	4 Dokumen 2 Laporan	100 %	266,878,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	100	270,600,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Ngawi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Tolok Ukur	Target		
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Jumlah dokumen usulan pemindahtanganan yang dilaksanakan Jumlah dokumen usulan penghapusan yang ditindaklanjuti Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	5 Dokumen 30 Dokumen 3 Kali	100 %	246.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	100	251.500.000	
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	Jumlah Dokumen Nilai Aset yang disusun Jumlah Rekonsiliasi Inventarisasi Aset tahunan yang dilaksanakan Jumlah Rekonsiliasi yang dilaksanakan	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kategori Tertib	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	5 Dokumen 4 Kali 4 Kali	100 %	119.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kategori Tertib	100	125.000.000	
5 02 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>							<b>2.197.209.000</b>				<b>2.244.400.000</b>	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah							<b>2.197.209.000</b>				<b>2.244.400.000</b>	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Fasilitas dan koordinasi kegiatan Perencanaan Pendapatan Jumlah pendampingan Aplikasi PBB dan BPHB yang di laksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	10 Kali 2 Kali	95 % 100	70.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	76.200.000	
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah koordinasi tentang pengembangan daerah yang dilaksanakan Jumlah Bimtek Pengelolaan Pajak yang diselenggarakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	3 Kali 1 Kali	95 % 100	72.332.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	77.000.000	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Obyek Pajak Daerah yang di data dan di daftarkan Jumlah Potensi wajib pajak daerah yang di survey	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	1500 Obyek Pajak 1000 Wajib Pajak	95 % 100	84.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	91.000.000	
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah monitoring pendapatan daerah dan PBB yang dilaksanakan Jumlah pemeriksa objek pajak daerah yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	12 Kali 12 Kali	95 % 100	12.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	16.300.000	



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Ngawi  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN  
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
5 02 04 2.01 08	Peneleapan Wajib Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah aplikasi pajak daerah yang dipelihara Jumlah DHKP, SPPT dan SKPD yang dicetak Jumlah himbauan pajak yang di cetak Jumlah objek pajak yang ditetapkan Jumlah pendampingan Penetapan Wajib Pajak Daerah yang dilaksanakan Jumlah SPPT dan SKPD yang dicetak	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	95 % 100	3 Aplikasi 652460 Lembar 10000 Lembar 615750 OP 2 Kali 652400 Lembar	95 % 100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	996,700,000		
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah konsultasi pajak daerah yang dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	95 % 100	4 Kali	95 % 100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	44,800,000		
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Deviasi realisasi PAD thd anggaran PAD dalam APBD yang disusun tepat waktu	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	95 % 100	0,86 %	95 % 100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	86,200,000		
5 02 04 2.01 11	Pemajihhan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah kegiatan intensifikasi / pengalihan Pajak daerah dilaksanakan	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	95 % 100	240 Kali	95 % 100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	166,200,000		
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen Realisasi PBB yang di publikasikan di website Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Baik	Kab. Ngawi, Ngawi, Ketanggri	95 % 100	1 Dokumen 12 Laporan 5 Kali	95 % 100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase PAD terhadap APBD Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	95 % 100	690,000,000		
<b>TOTAL</b>											<b>501,574,856,741</b>	<b>514,740,902,500</b>		

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. Program Kegiatan disinkronkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan serta visi misi Pemerintah Kabupaten Ngawi 2021-2026 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2022. Renja Badan Keuangan ini sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan di danai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, selain itu, Renja Badan Keuangan Tahun 2022 juga memiliki fungsi evaluative terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun sebelumnya. Renja Badan Keuangan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Dengan tersusunnya Renja Badan Keuangan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Akhir kata semoga Renja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

BUPATI NGAWI,  
  
ONY ANWAR HARSONO

**LEMBAR VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

NAMA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN  
PROVINSI

*Badan Keuangan*  
: Ngawi  
: Jawa Timur

Tanggal Verifikasi :

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
<b>I PENDAHULUAN</b>						
1.1	Latar Belakang					
	Menjelaskan mengenai :	a Pengertian	✓			
		b Proses Penyusunan Renja	✓			
		c Keterkaitan renja dengan RKPd	✓			
		d Keterkaitan renja dengan Renstra Perangkat Daerah	✓			
		e Tindak Lanjut dengan proses penyusunan RAPBD	✓			
1.2	Layanan Hukum	Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan Perangkat Daerah	✓			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	✓			
<b>II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>						
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat	a Pokok materi disampaikan sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017	✓			
		b Format tabel 2.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (Diambil dari aplikasi SMEP)	✓			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan	✓			
		b Format tabel 2.2 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	a Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah	✓			
		b Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah	✓			
	Menjelaskan mengenai :	c Dampak terhadap visi misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional	✓			
		d Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah	✓			



NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	e Formulasi isu-isu penting, rekomendasi, catatan strategis untuk di TL pada tahun perencanaan	✓			
	Menjelaskan mengenai :	a Proses membandingkan Ranwal RKPD dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah	✓			
		b Alasan proses review dilakukan	✓			
		c Temuan setelah proses review	✓			
		d Format tabel 2.4 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (usulan hasil musrenbangcam, usulan dari Pokir DPRD, dan usulan langsung dari masyarakat)					
	Menjelaskan mengenai :	a Menjelaskan proses usulan tersebut diperoleh	✓			
		b Menjelaskan kesesuaian usulan dengan isu strategis dan tupoksi Perangkat Daerah	✓			
		c Format tabel 2.5 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
<b>III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>						
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	✓			



NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN		KETERANGAN
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	
IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Menjelaskan mengenai :	a	✓	
			b	✓	
			c	✓	
			d	✓	
V	PENUTUP	Berisikan uraian penutup :	a	✓	
			b	✓	
			c	✓	
			d	✓	
				✓	
VI	LAMPIRAN	Pemetaan Program/Kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019	a	✓	
			b	✓	
			c	✓	
			d	✓	

VERIFIKATOR		TANDA TANGAN
NO	NAMA	
	GAURAH W	